



LAPORAN TAHUNAN

PPN PEMANGKAT

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmat-Nya lah sehingga penyusunan Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat tahun 2024 ini dapat terselesaikan. Laporan tahunan ini adalah merupakan refleksi dan gambaran realisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan dan juga merupakan tolak ukur dari pelaksanaan tersebut berdasarkan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020. Tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan.

Laporan ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi perkembangan pembangunan dan operasional PPN Pemangkat sekaligus sebagai bahan informasi dalam penentuan kebijakan serta perencanaan pengembangan sektor kelautan dan perikanan di masa yang akan datang.

Dalam penyusunan laporan tahunan ini masih belum sempurna, oleh karena itu diperlukan saran untuk penyempurnaan laporan diwaktu mendatang sangat dihargai. Semoga laporan tahunan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Sambas, 11 Maret 2025
Kepala PPN Pemangkat



Ditandatangani
Secara Elektronik

Anam Tofani, S.Pi, M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	v
Ruang Lingkup (Sistematika)	vi
 I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Kedudukan	3
1.4 Visi	3
1.5 Misi	4
1.6 Tujuan dan Sasaran Program	4
1.7 Organisasi & Kepegawaian	7
Bagan Struktur Organisasi	8
Sumber Daya Manusia	9
Pengembangan Pegawai	10
Pengembangan Kompetensi Pegawai	11
Budaya Kerja Pegawai	14
Kegiatan K-5	15
Kehumasan	17
 II. KINERJA DAN ANGGARAN	
2.1 Sasaran Strategis Perikanan Tangkap	20
2.2 Capaian Kinerja PPN Pemangkat	22
2.3 Kinerja Anggaran	23
2.4 Peningkatan Peralatan Perkantoran	24
 III. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
3.1 Penerimaan PNBP	25
3.2 Volume Produksi Perikanan Tangkap	27
3.3 Tingkat Kinerja	29
3.4 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran	32
3.5 Nilai Pengendalian Pengembangan Fasilitas	34

DAFTAR ISI

III. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

3.6	Kapal Perikanan Izin Daerah	36
3.7	Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan	38
3.8	Nilai PM Pembangunan ZI PPN Pemangkat	40
3.9	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa	42
3.10	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN	44
3.11	Nilai SKM Lingkup PPN Pemangkat	46
3.12	Infografis Nilai SKM PPN Pemangkat	48

IV. KEGIATAN KESYAHBANDARAN, OPERASIONAL & PENGUSAHAAN

4.1	Surat Persetujuan Berlayar (SPB)	50
4.2	Logbook Penangkapan Ikan	51
4.3	Pelayanan Penerbitan SKKP	52
4.4	Pelayanan SHTI	53
4.5	Asuransi Nelayan & PKL	54
4.6	SCPIB & SKN	55
4.7	Frekuensi Kapal Bongkar	56
4.8	Produksi Perikanan	48
4.9	Inspeksi Pembongkaran Ikan	58
	Pengujian Mutu Hasil Perikanan	59
	Pembongkaran Hasil Tangkapan	60
4.10	Pelayanan Air Bersih	62
4.11	Pemanfaatan Lahan & Bangunan	63
4.12	Pelayanan Pas Masuk	65
4.13	Pelaksanaan PIPP	68

DAFTAR ISI

V. INOVASI, CAPAIAN & KEGIATAN TAHUN 2024

5.1 Inovasi “Terjala”	71
5.2 Penghargaan PPN Pemangkat	73
5.3 Dokumentasi Kegiatan	75

VI. PENUTUP

6.1 Penutup	92
-------------	----

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Tahun 2024 merupakan refleksi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan berbagai peningkatan terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), pelaksanaan anggaran dan kegiatan, inovasi, dan berbagai penghargaan yang telah didapatkan selama tahun 2024.

Secara umum kinerja PPN Pemangkat tahun 2024 dapat di katakan BAIK, dengan peningkatan secara signifikan terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) selama tahun 2024.

Peningkatan kinerja signifikan ini tidak terlepas dari dukungan anggaran yang berasal dari APBN Murni yang ditetapkan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dengan pagu Rp. 12.039.872.000,-.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat sebagai Unit Pelayanan Publik, terus berupaya dalam mewujudkan pelayanan prima kepada stakeholder. Peningkatan integritas dan kualitas pelayanan dengan mengusung core value dan jargon *SMART* (Sinergi, Melayani, Akuntabel, Responsif, Tanggung Jawab) sebagai pedoman dalam melakukan pelayanan.

RUANG LINGKUP (SISTEMATIKA)

Penyusunan Laporan Tahunan Tahun 2024 merupakan refleksi pelaksanaan tugas dan fungsi Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat selama kurun waktu Tahun 2024. Adapun sistematika penyajian Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Tahun 2024 sebagai berikut:

- **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Pada bagian ini disajikan secara ringkas kegiatan dan capaian yang telah dilaksanakan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat selama kurun waktu satu tahun.

- **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini disajikan informasi umum tentang tugas dan fungsi serta penjelasan secara umum Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat, bagan organisasi, kepegawaian, dan kehumasan.

- **BAB II KINERJA DAN ANGGARAN**

Menguraikan secara singkat alokasi, target, dan realisasi anggaran tahun 2024.

- **BAB III CAPAIAN INDIKATOR KINERJA**

Menguraikan capaian-capaian dan analisa pada beberapa indikator kinerja PPN Pemangkat.

- **BAB IV INOVASI, CAPAIAN, DAN KEGIATAN TAHUN 2024**

Menguraikan Inovasi, Capaian/penghargaan yang diraih, serta pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2024.

- **BAB V PENUTUP**

Kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan pencapaian, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian target serta strategi pemecahan masalah.



BAB I PENDAHULUAN



1.1 LATAR BELAKANG

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung pelaksanaan program Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan mengintegrasikan seluruh program dan kegiatannya agar dapat terakomodir dan terlaksana dengan baik serta menghasilkan output sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam mendukung program utama Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan, serta dalam rangka menjawab tuntutan dan harapan pengguna jasa dan masyarakat perikanan pada umumnya, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat telah menyusun suatu rencana yang sistematis, terinci, terarah dan berkesinambungan yang berisikan pernyataan Visi, Misi, tujuan dan sasaran, serta kebijaksanaan program dan kegiatan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Berbagai kegiatan telah dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut. Untuk itu, perlu disusun sebuah laporan tahunan yang merupakan gambaran pelaksanaan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang memuat capaian, kendala serta tindak lanjut atas kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2024. Laporan tahunan tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan atas kegiatan tahun berikutnya.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat adalah sebagai berikut:

- 1.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- 2.Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- 3.Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
- 4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;
- 5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 6.Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 7.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. PER.13/MEN/2012 Tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan;
- 8.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;
- 9.Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 04/MEN-KP/KP.430/XII/2019 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Setara Eselon II di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 10.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
- 11.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap;
- 12.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan;

1.3 KEDUDUKAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN- KP/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap. Pelabuhan Perikanan adalah Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun dasar hukum pengelolaan pelabuhan perikanan antara lain :

1. Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
2. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1985 tentang Pembinaan Kepelabuhanan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang perubahan tarif atas jenis PNBP yang berlaku di Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER. 08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan; dan
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 03/MEN/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan.

1.4 VISI

Selaku Unit Pelaksana Teknis Perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan mengarah pada tujuan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat maka Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat menetapkan visi yaitu “Terwujudnya Pusat Industri Perikanan Tangkap di Kalimantan Barat agar Tercapai Pelabuhan Perikanan yang Maju, Berkelanjutan menuju Masyarakat Perikanan Tangkap yang Sejahtera”. Berdasarkan visi tersebut dapat diartikan bahwa kawasan PPN Pemangkat merupakan titik sentral bagi pertumbuhan dan pengembangan kegiatan industri perikanan mulai dari sub sistem penyediaan sarana produksi dan pengolahan hasil perikanan serta sub sistem pemasaran produk. Di sisi lain dalam operasionalnya juga senantiasa mengutamakan pelayanan publik guna mendukung peningkatan produktifitas nelayan dan pengusaha perikanan serta menjaga keseimbangan antara aspek pemanfaatan sumberdaya perikanan dengan tingkat kelestariannya.

1.5 MISI

Untuk dapat mencapai Visi yang telah ditetapkan, memperhatikan tingkat operasional pelabuhan yang secara nyata telah memberikan manfaat yang cukup besar terhadap kegiatan ekonomi perikanan, maka PPN Pemangkat mengemban misi sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan zona integritas sesuai standar ISO 9001:2015;
2. Peningkatan kompetensi nelayan di pelabuhan perikanan;
3. Peningkatan kontribusi ekonomi melalui investasi dan pelayanan usaha di pelabuhan perikanan;
4. Peningkatan keberlanjutan sumber daya perikanan tangkap melalui penyiapan data dan informasi di pelabuhan perikanan yang akurat;
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pembinaan SDM dan pengelolaan anggaran yang profesional dan akuntabel.

1.6 TUJUAN & SASARAN PROGRAM

Menjabarkan misi Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat, maka tujuan pembangunan perikanan tangkap di pelabuhan perikanan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan zona integritas (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan penerapan ISO 9001:2015 dengan melaksanakan perubahan pola pikir dan budaya kerja sebagai alat ukur peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat;
2. Peningkatan Kompetensi nelayan di PPN Pemangkat dengan melaksanakan bimbingan teknis baik penangkapan ikan, keselamatan pelayaran dan mutu hasil perikanan yang difasilitasi program internal maupun program Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
3. Peningkatan investasi dan pelayanan usaha di pelabuhan perikanan dengan melakukan sosialisasi, promosi dan peningkatan fasilitas pelabuhan untuk meningkatkan peluang usaha di PPN Pemangkat;
4. Menyiapkan data dan informasi pelabuhan perikanan yang akurat dengan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi yang aktual dan dapat dipertanggungjawabkan;
5. Penyelenggaraan sistem kepegawaian dan pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi.

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas “Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan”.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut pelabuhan perikanan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran serta pelaporan dibidang Pelabuhan perikanan;
2. Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan perikanan;
3. Pelaksanaan pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
4. Pelaksanaan pemeriksaan log book penangkapan ikan;
5. Pelaksanaan pelayanan penerbitan persetujuan berlayar;
6. Pelaksanaan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
7. Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
8. Pelaksanaan pembangunan, dan pengawasan serta pengendalian sarana dan prasarana;
9. Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu serta pengolahan pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
10. Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
11. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi;
12. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik;
13. Pelaksanaan inspeksi pengendalian mutu hasil perikanan pada kegiatan penangkapan ikan;
14. Pelaksanaan pengendalian lingkungan di Pelabuhan perikanan; dan
15. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

1.7 ORGANISASI & KEPEGAWAIAN

Susunan dan tata kerja Pelabuhan Perikanan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat terdiri dari:

1. Tim Kerja Dukungan Manajerial

Tim Kerja Dukungan Manajerial mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan;

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap.

Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap sebagai berikut:

- Kelompok Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran; dan
- Kelompok Tata Kelola dan Pelayanan Usaha.

2. Tim Kerja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran

Kelompok Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis operasional kepelabuhanan, kapal perikanan, dan kesyahbandaran.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

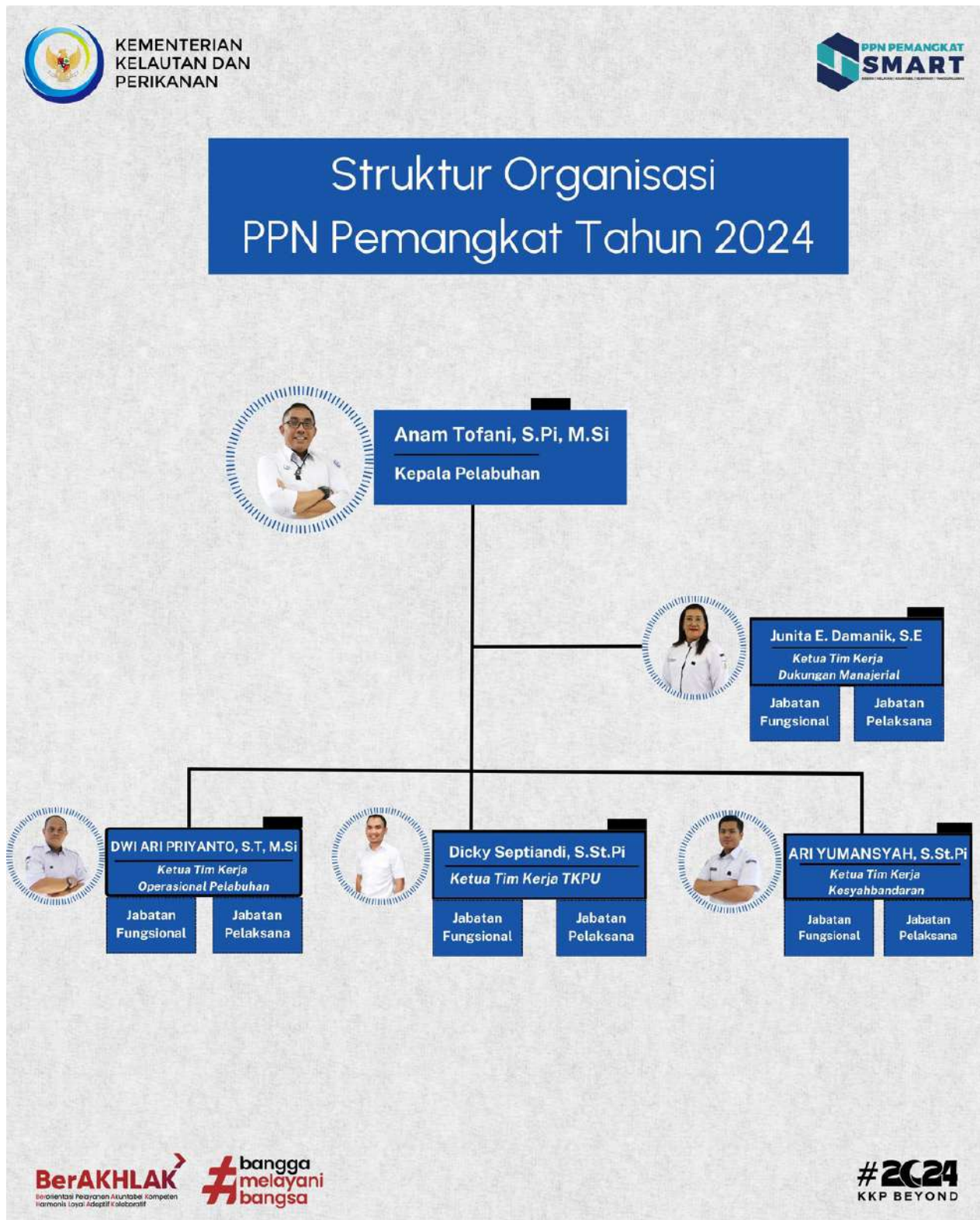
- pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;
- pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
- pelaksanaan pemeriksaan Log Book Penangkapan Ikan;
- pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
- pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
- pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;
- pelaksanaan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (S-CPIB);
- pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan; dan
- pelaksanaan bimbingan teknis operasional pelabuhan, kesyahbandaran, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta pelayanan usaha.

3. Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha

Kelompok Tata Kelola dan Pelayanan Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pengendalian sarana dan prasarana, serta fasilitasi di pelabuhan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian, serta pendayagunaan sarana dan prasarana;
- Bimbingan teknis serta fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantina ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, pengolahan, dan pemasaran, serta distribusi hasil perikanan;
- Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha; dan
- Bimbingan teknis pelayanan usaha.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



SUMBER DAYA MANUSIA

Sampai dengan akhir Tahun 2024, jumlah pegawai Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat sebesar 76 orang yang terdiri dari ASN sebanyak 44 orang, TTK sebesar 12 dan Outsourcing 14 orang yang dapat dilihat pada gambar berikut:

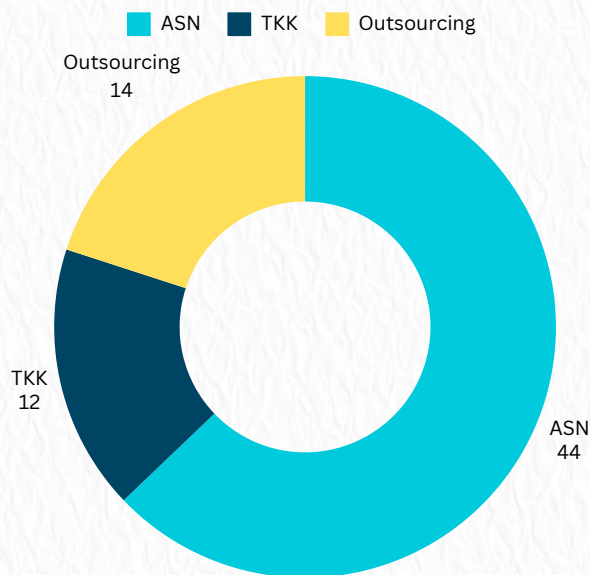


DIAGRAM. 1 KOMPOSISI ASN DI PPN PEMANGKAT

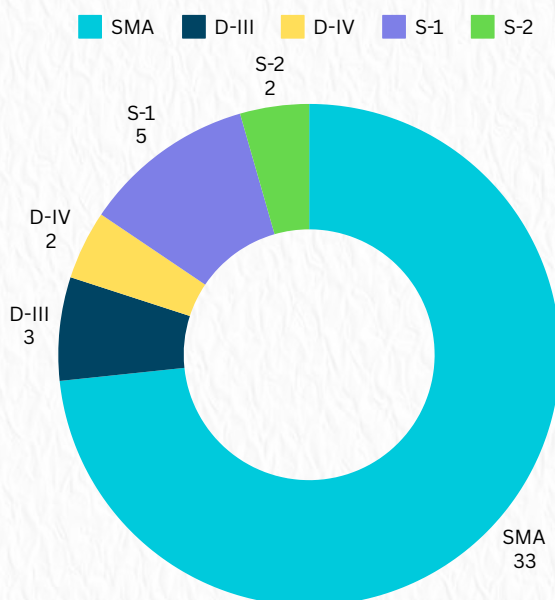


DIAGRAM.2 KOMPOSISI ASN DAN TTK BERDASARKAN PENDIDIKAN

PENGEMBANGAN PEGAWAI

Pembinaan terhadap pegawai diarahkan untuk meningkatkan Kompetensi melalui berbagai pelatihan/kursus/bimtek dan apresiasi dengan maksud :

1. Menambah pengetahuan dan wawasan untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas serta menumbuhkan motivasi bagi pegawai.
2. Memberikan pemahaman kepada para staf akan pentingnya disiplin, loyalitas dan tanggung jawab.
3. Memberikan kesempatan kepada pegawai dalam meningkatkan karier.
4. Meningkatkan kebersamaan dan kekompakan melalui pembinaan organisasi pegawai.

Pengembangan Pegawai dilakukan dengan mengikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan, kursus, apresiasi dan workshop yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penyesuaian ijazah, mutasi pegawai, serta promosi lainnya diberikan bagi pegawai yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

Selain itu juga, terkait kesejahteraan pegawai ditempuh melalui berbagai upaya antara lain:

1. Mendorong pegawai menjadi peserta asuransi kesehatan melalui BPJS;
2. Menyediakan minuman untuk semua pegawai pada jam kerja;
3. Menyediakan pakaian kerja karyawan dan kelengkapannya;
4. Mengikut sertakan tenaga kontrak dalam keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI

Pengembangan kompetensi pegawai merupakan proses yang penting dalam meningkatkan kualitas dan kinerja karyawan di dalam sebuah organisasi. Ini melibatkan berbagai kegiatan dan program yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap karyawan agar sesuai dengan tuntutan pekerjaan dan tujuan organisasi. Berikut beberapa kegiatan peningkatan kompetensi pegawai PPN Pemangkat melalui Pendidikan dan Pelatihan tahun 2024.



Dit. Kepelabuhanan Perikanan bekerja sama dengan Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan Pelatihan Dasar Kesyahbandaran bagi Petugas Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan pada tgl 26 - 31 Agustus 2024 di BPPPP Tegal. Asisten Produksi Perikanan Tangkap Terampil, M. Syaiban menjadi peserta dalam kegiatan ini



Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Terampil PPN Pemangkat, Ilham Takbirdul Adham, mengikuti Bimbingan Teknis Engineering Design dalam Rangka Pengukuran Kapal Perikanan di Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk Jakarta, 7 s.d 13 Desember 2024



SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN
DL. 01.00/2650/2024

Arsip Nasional Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa:

 Nama: Aditya Very Sulistyawan, A.Md NIP: 1997032520201216003 Tempat, Tanggal Lahir: Magelang 25 Maret 1997 Pangkat, Golongan Ruang: Pengatur Tingkat I, I/II Pendidikan: D-3 Instansi: Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kualifikasi: Sangat Memuaskan
--	---

pada Pelatihan Fungsional Arsiparis Keterampilan Angkatan VI Tahun 2024 dengan bobot 620 jam pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Arsip Nasional Republik Indonesia pada tanggal 7 Agustus sampai dengan 26 September 2024 dengan metode pembelajaran dalam jaringan (online).

Bogor, 16 Desember 2024
Ansip Nasional Republik Indonesia
Pdt. Kepala,

Drs. Iman Gunarto, M.Hum
NIP. 196307291990031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

MATERI PELATIHAN

1. Kebijakan Kearsipan Nasional 2. Pengantar Kearsipan 3. Penyelenggaraan Kearsipan 4. Dinamika Kelompok 5. Peraturan Perundang-Undangan Kearsipan 6. Teori, Filsafat, dan Sejarah Kearsipan 7. Organisasi Kearsipan 8. Penulisan Laporan 9. Pengantar Pengelolaan Arsip Dinamis 10. Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis 11. a. Tata Naskah Drive 12. b. Klasifikasi Arsip 13. c. Jadwal Retensi Arsip 14. d. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip 15. e. Pengarsipan Sunat 16. Program Arsip Vital 17. Pengelolaan Arsip Aktif	18. Pengelolaan Arsip Inaktif 19. Pengelolaan Arsip Terjaga 20. Penyusunan Arsip 21. Pengantar Pengelolaan Arsip Statis 22. Akuisisi Arsip dan Pengembangan Khazanah 23. Pengelolaan Arsip Statis 24. Preservasi Arsip 25. Layanan Informasi Kearsipan 26. Penerapan Arsip dan Publikasi 27. Bimbingan Teknis Kearsipan 28. Pengelolaan Arsip Elektronik 29. Pengelolaan Arsip Berbasis TIK 30. Observasi Penyelenggaraan Kearsipan 31. Jabatan Fungsional Arsiparis 32. Presentasi Observasi Penyelenggaraan Kearsipan 33. Praktik Kerja Lapangan
--	---

Bogor, 16 Desember 2024
Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia,

Dra. Listianingtyas Mugiwati, M.Pd
NIP. 19661221199005001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Arsiparis PPN Pemangkat, Aditya Very Sulistyawan, mengikuti Pelatihan Fungsional Arsiparis Keterampilan Angkatan VI Tahun 2024 secara daring yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dari tanggal 7 Agustus s.d 26 September



Ketua Tim Kerja Tata Kelola Pelayanan Usaha, Dicky Septiandi, mengikuti Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level I di Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, Sukamandi, Subang, Jawa Barat, yang dilaksanakan dari tanggal 27 s.d. 28 September 2024



Ketua Tim Kerja Tata Kelola Pelayanan Usaha, Dicky Septiandi, mengikuti Uji Kompetensi Sertifikasi Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton di Bogor, Jawa Barat, yang dilaksanakan dari tanggal 4 s.d. 10 Agustus 2024

BUDAYA KERJA PEGAWAI



Dalam Penerapan Budaya Kerja, PPN Pemangkat selalu menerapkan budaya kerja yang salah satunya diterapkan melalui kegiatan apel pagi yang dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis di tiap minggunya serta kegiatan senam pagi sebagai wadah keakraban sekaligus penyegaran jasmani dan rohani bagi para pegawai PPN Pemangkat. Pada dasarnya setiap organisasi memiliki budaya kerja yang unik, dan penting bagi kepemimpinan dan manajemen untuk memahami, mengembangkan, dan memelihara budaya yang sesuai dengan nilai dan tujuan organisasi. Budaya kerja yang positif dan sehat dapat menjadi aset berharga bagi pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang suatu organisasi.

KEGIATAN KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KETERTIBAN, KEAMANAN DAN KESELAMATAN KERJA (K-5)

KEBERSIHAN

Dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih, indah, sehat dan higienis telah dilakukan kegiatan secara rutin meliputi kebersihan lingkungan halaman perkantoran, ruangan kantor, TPI, Balai Pertemuan Neayan, Unit Bisnis Perikanan Terpadu (UBPT), dermaga lapor kapal, bantaran sungai kaliyasa serta kawasan pos pelayanan terpadu. Penyediaan sabun cuci tangan dan hand sanitizer serta tisu toilet.



Aktivitas rutinitas kebersihan lingkungan PPN Pemangkat

Untuk mencegah terjadinya kecelakaan dalam kawasan pelabuhan sebagai pusat kegiatan ekonomi maka ditempuh langkah-langkah berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan satuan pengamanan bekerjasama dengan Polres Pemangkat, pelatihan pemadam kebakaran bekerjasama dengan Dinas Pemadam dan melakukan pelatihan mandiri pemadaman kebakaran bagi pegawai, Satpam dan Petugas Kebersihan PPN Pemangkat.



Gambar Alat Penunjang Keselamatan Kerja di PPN Pemangkat



*Gambar Simulasi Penanganan Kebakaran Pada Kapal Perikanan
Keselamatan dan Keamanan Kapal di Pelabuhan Perikanan*

KEHUMASAN

PPN Pemangkat memiliki beberapa layanan kehumasan, diantaranya media sosial (Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube). Selain itu, layanan informasi PPN Pemangkat bisa diakses baik melalui, telepon, website, maupun email. Serta memiliki sarana pengaduan yang dapat diakses melalui www.website.lapor.go.id.



INSTAGRAM



Instagram PPN Pemangkat memiliki jumlah pengikut sebanyak 1.092 dengan rata-rata post mingguan sebanyak 15 postingan dan rata-rata disukai sebanyak 30 likes per post.



FACEBOOK



Facebook PPN Pemangkat memiliki jumlah pengikut sebanyak 1400 teman dengan rata-rata post mingguan sebanyak 15 postingan dan rata-rata disukai sebanyak 20 likes per post.



TWITTER



Twitter PPN Pemangkat memiliki jumlah pengikut sebanyak 898 dengan rata-rata post mingguan sebanyak 10 postingan dan rata-rata disukai sebanyak 5 likes per post.

WEBSITE



Masyarakat dapat mencari informasi melalui Website PPN Pemangkat dapat diakses melalui <https://kkp.go.id/unit-kerja/djpt/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara-pemangkat.html>

LAYANAN INFORMASI



Masyarakat dapat mencari informasi melalui Website PPN Pemangkat dapat diakses melalui <https://ppid.kkp.go.id/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara-pemangkat/>

KANAL PENGADUAN



Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat yang terintegrasi secara Nasional dengan laman akses website www.lapor.go.id



BAB II KINERJA DAN ANGGARAN



2.1 SASARAN STRATEGIS PERIKANAN TANGKAP

Sasaran program pembangunan perikanan tangkap merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh DJPT sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Adapun Sasaran Program Level I DJPT 2024 yaitu :

1. Kesejahteraan nelayan meningkat, dengan indikator kinerja:
 - a. Nilai Tukar Nelayan (NTN);
2. Sumber daya perikanan tangkap berkelanjutan, dengan indikator kinerja:
 - a. Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (persen)
3. Ekonomi Sektor Perikanan Tangkap Meningkat, dengan indikator kinerja
 - a. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perikanan Tangkap; dan
 - b. Tenaga Kerja yang terlibat pada sektor perikanan tangkap.
4. Tata kelola sumber daya perikanan tangkap bertanggung jawab, dengan indikator kinerja
 - a. WPPNRI yang Melaksanakan Penangkapan Ikan Terukur
5. Produktivitas Perikanan Tangkap meningkat, dengan indikator kinerja
 - a. Produksi perikanan tangkap
6. Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap, dengan indikator kinerja
 - a. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan DJPT;
 - b. Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI di lingkungan DJPT;
 - c. Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis di lingkungan DJPT;

- d. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa di lingkungan DJPT;
- e. Tingkat kepatuhan BMN di lingkungan DJPT;
- f. Unit kerja berpredikat menuju WBK di lingkungan DJPT;
- g. Penilaian mandiri SAKIP di lingkungan DJPT;
- h. Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP di lingkungan DJPT;
- i. Indeks profesionalitas ASN di lingkungan DJPT;
- j. Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang undangan di lingkungan DJPT;
- k. Persentase unit kerja yang menerapkan manajemen pengetahuan terstandar di lingkungan DJPT;
- l. Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan DJPT;
- m. Tingkat kepatuhan pengelolaan data di lingkungan DJPT;
- n. Indikator pelaksanaan anggaran di lingkungan DJPT; dan
- o. Nilai kinerja anggaran di lingkungan DJPT (level)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1 Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	1 Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Rp juta)	957,31
2 Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Meningkat	2 Volume Produk Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Ton)	12.132
3 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang Berdaya Saling	3 Persentase pemohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	100
	4 Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	84
	5 Tingkat Pelayanan Keasyabandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	100
4 Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang optimal	6 Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	40
	7 Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	30,10
5 Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saling di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	8 Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	490
6 Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	9 Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (persen)	100
7 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	10 Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	80
	11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	80
	12 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	94
	13 Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (indeks)	84
	14 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	80
	15 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	80
	16 Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	93,76
	17 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	71
	18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Inklusif Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (indeks)	88,30

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja 2024

2.2 CAPAIAN KINERJA PPN PEMANGKAT

Capaian kinerja PPN Pemangkat diukur secara periodik dinilai melalui website resmi kinerja lingkup KKP (kinerjaku.go.kkp.id). Pada Triwulan IV capaian kinerja PPN Pemangkat mendapatkan predikat Baik



Capaian Kinerja 2024

Capaian kinerja merupakan pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam sasaran kinerja PPN Pemangkat. Adapun capaian kinerja PPN Pemangkat Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	%
1	Nilai INSP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Pemerintahan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Rp juta)	957,31	1.003,35	104,81
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Meningkat	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Ton)	12.132	11.422	94,15
3	Peningkatan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang Berdaya Saing	Persentase pemchoran pengetahuan yang dimiliki dan atau dimiliki di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	100	100	100
		Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	84	97,25	115,77
		Tingkat Pelayanan Kesyahbantaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	100	100	100
4	Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang optimal	Persentase Peningkatan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	40	45,21	113,03
5	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Nilai Peningkatan Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	30,10	82,51	120
		Kapal Perikanan (ini daerah yang memenuhi ketentuan kapal)	490	496	101,22
6	Pengelolaan Awar Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Persentase Peningkatan Peningkatan Kompetensi dan Peningkatan Nelayan Awar Kapal Perikanan (persen)	12	17,16	120
7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	80	92,52	115,65

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	80	100	120
Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	94	97,81	104,05
Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (indeks)	84	90,44	107,67
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	80	96,29	120
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	80	90	112,50
Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	93,76	93,27	99,48
Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	71	90	120
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Indeks)	88,30	92,92	105,23

Capaian IKU 2024

2.3 KINERJA ANGGARAN

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan, PPN Pemangkat telah diberi alokasi anggaran oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun sumber dana pembangunan dalam rangka pelaksanaan program berasal dari APBN Murni yang ditetapkan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dengan pagu awal adalah Rp. 12.039.872.000,- dan pagu akhir setelah serangkaian revisi sebanyak 17 kali pada akhirnya pagu akhir adalah RP. 12.324.198.000,-.

Terkait capaian realisasi anggaran tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Realisasi Anggaran 2024

2.4 PENINGKATAN PERALATAN PERKANTORAN

Secara umum Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat diarahkan untuk mendukung pelaksanaan fungsi Pemerintah dan Fungsi Pelayanan Masyarakat dalam arti yang luas. Oleh karena itu, ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM), Fasilitas (sarana prasarana) dalam jumlah kapasitas yang memadai serta mendukung berbagai aturan perundangan yang berlaku merupakan syarat utama dalam mencapai tingkat keberhasilannya. Pada Tahun Anggaran 2024 sampai pada tanggal 31 Desember 2024 persentase realisasi fisik telah mencapai 91,59%.

Pada tahun 2024 terdapat pekerjaan fisik bangunan berupa pekerjaan pembangunan gedung arsip dan gedung pelayanan. Pada tahun 2024 dilaksanakan pengadaan belanja modal berupa peralatan, yang terdiri dari :

- Pengadaan Lemari Arsip tanpa pintu sebanyak 5 Unit;
- Pengadaan Meubelair sebanyak 26 Unit;
- Pengadaan Printer Scanner sebanyak 1 Unit;
- Pengadaan Laptop sebanyak 4 Unit;
- Pengadaan Camera Digital sebanyak 1 Unit;
- Pengerjaan portal pas masuk sebanyak 1 Unit;
- Pengerjaan Selasar sebanyak 1 Unit;
- Pengadaan Lampu peringatan Masuk Area Pelabuhan sebanyak 1 Unit.



BAB III

CAPAIAN

INDIKATOR KINERJA

PPN PEMANGKAT



IK. 1. PENERIMAAN PNBP DI PPN PEMANGKAT (RP. JUTA)

Indikator nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakanpendapatan yang diperoleh pelabuhan yang berasal dari pelayanan jasa yang berada di Pelabuhan Perikanan, baik penerimaan fungsional maupun penerimaan umum. Perhitungan indikator ini yaitu nilai akumulasi Penerimaan atas jasa-jasa bulan berjalan. Berikut Capaian Indikator Kinerja Nilai PNBP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Capaian IK Penerimaan PNBP di PPN Pemangkat

SS-1				Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Pemangkat				
IKU-1				Penerimaan PNBP di PPN Pemangkat (Rp. Juta)				
Realisasi Triwulan IV (YoY)				2024			Renstra 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target Tahunan	Realisasi Triwulan IV	% Capaian thd Target Tahunan	Target 2024	%Capaian thd Target 2024
510,29	165,95	953,85	1.133,46	957,31	1.003,35	104,81	1.000,00	100,34

Sampai dengan akhir tahun 2024 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 957.000.000,- berhasil dicapai dengan realisasi sebesar Rp.1.003.351.245,-. Jika dibandingkan dengan target tahunan maka persentasenya sebesar 104,8%. Target pada Renstra untuk IK PNBP di PPN Pemangkat pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1.000 Juta.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada IKU ini disebabkan oleh kinerja ASN (PNS dan PPPK) yang membaik sehingga pelayanan yang dulu belum ditangani secara optimal, saat ini dengan sistem yang baru berdampak pada peningkatan pelayanan menjadi lebih baik. Dari sisi anggaran, untuk mendukung IKU ini terdapat pagu anggaran sebesar Rp. 130.019.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 121.067.800,00 atau persentase realisasi sebesar 93,12%.

Beberapa hal yang membuat keberhasilan peningkatan kinerja pada IKU ini adalah :

1. Penggunaan aplikasi JALA PUKAT untuk pemungutan jasa kepelabuhanan (Pengadaan Air Bersih, Sewa Alat Berat, Listrik, Pas Masuk), dengan aplikasi tersebut data jasa kepelabuhanan dapat berekonsiliasi dengan baik;
2. Penggunaan aplikasi SIJAKA untuk penarikan jasa Tambat Labuh di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat;
3. Penertiban Pas Masuk di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat.

Penertiban pas masuk sudah dilakukan perbaikan dengan menggunakan portal semi otomatis, penambahan jumlah petugas pas masuk dari pegawai P3K dan pengalihan jalur yang dulunya gerbang keluar dijadikan gerbang masuk untuk semua kendaraan sehingga dapat meminimalisir lost control terhadap kendaraan/barang yang masuk ke pelabuhan perikanan.



Perbandingan Penerimaan PNPB Tahun 2020 s.d. 2024

Capaian PNPB Non SDA PPN Pemangkat

IK. 2. VOLUME PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP (TON)

Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat merupakan indikator kinerja yang menunjukkan jumlah volume produksi perikanan tangkap yang didaratkan kapal penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dengan pengukuran jumlah volume produksi perikanan tangkap yang didaratkan oleh kapal penangkapan ikan di PPN Pemangkat.

SS-2				Produktivitas Perikanan Tangkap di PPN Pemangkat Meningkat						
IKU-2				Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Pemangkat (Ton)						
Realisasi Triwulan IV (YoY)				2024					Renstra 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Capaian thd Target Tahunan	% Capaian thd Target Triwulan IV	Target 2024	%Capaian thd Target 2024
9.023	2.099	8.764	13.228	12.132,0	12.132,0	11.422,0	94,1	94,1	8.850,0	129,1

Capaian pada IK Volume Produksi Perikanan Tangkap ini sampai dengan akhir triwulan IV 2024 sebesar 11.422 ton, dari target sebesar 12.132 ton yang mana merupakan target tahunan dan persentase capaiannya sebesar 94.14%.

Target indikator kinerja ini pada renstra sebesar 8.850 Ton, selisih 3.282 Ton lebih sedikit dibanding dengan target tahunan. Realisasi pada Triwulan IV ini jika dibandingkan target Renstra persentasenya adalah 129%.

Penyebab keberhasilan peningkatan kinerja pada IKU ini adalah pencatatan data produksi yang baik melalui sistem online (Aplikasi PEDATI), setiap kapal yang melakukan pembongkaran di dermaga maupun kapal angkut ikan yang masuk dari pelabuhan lain (*port to port*) tercatat dengan baik serta ikan yang masuk melalui pengangkutan dari darat.

Untuk pencapaian target volume produksi, didukung dengan anggaran dan sumber daya manusia. Peningkatan kinerja petugas data dan keaktifan penginputan pada aplikasi PIPP yang mengakibatkan pendataan produksi membaik. Dari segi anggaran, untuk mendukung kegiatan pada IKU ini terdapat pagu anggaran sebesar Rp. 237.080.000,00 dengan rincian kegiatan pendukung diantaranya adalah Evaluasi Pelaksanaan PNBP Pasca Produksi dan Penangkapan Ikan Terukur di Pelabuhan Perikanan, Penyelenggaraan, pengolahan dan validasi data statistik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, dan Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) yang operasional. Sampai dengan akhir Triwulan IV telah terealisasi sebesar Rp. 230.752.200,00 atau dengan persentase sebesar 97,33%.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian adalah diantaranya sebagai berikut :

1. Penggunaan aplikasi DAPOOR untuk penyediaan data Operasional Pelabuhan;
2. Penggunaan aplikasi PEDATI untuk pendataan hasil pembongkaran ikan;
3. Penggunaan aplikasi PIPP.



Capaian Volume Produksi Perikanan
dari Tahun 2020 s.d. 2024

IK. 3. TINGKAT KINERJA PPN PEMANGKAT (NILAI)

Indikator kinerja PPN Pemangkat merupakan upaya untuk menilai tingkat kinerja operasional yang didasarkan atas ketentuan kriteria teknis dan operasional kelas pelabuhan perikanan (sesuai SK Dirjen Perikanan Tangkap No 20/KEP-DJPT/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan, perubahan atas SK Dirjen Perikanan Tangkap No. 432/DPT.3/OT.220.D3/I/2008). Sebagai bagian dari kegiatan manajemen untuk menilai kinerja Pelabuhan Perikanan. Acuan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perikanan. Acuan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perikanan. Ruang lingkup meliputi :

- Administrasi dan sistem informasi;
- Fasilitas pelabuhan perikanan;
- Pelayanan umum; dan
- Investasi dan industri.

Pengukuran terhadap capaian indikator Tingkat Kinerja adalah berdasarkan hasil rata-rata nilai evaluasi pada aplikasi PIPP selama 1 tahun 2023 dengan kriteria sebagai berikut :

1. Frekuensi Pengiriman Data (PIPP)
2. E-logbook
3. Aplikasi SPB-online
4. SHTI
5. Realisasi Penyerapan Anggaran
6. Pendapatan Pelabuhan
7. Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan
8. Kapasitas Daya Tampung Kolam Pelabuhan
9. Panjang Dermaga
10. Kedalaman Kolam
11. Sarana Perbaikan (docking, bengkel)
12. Kelengkapan Fasilitas Pemasaran dan Distribusi Ikan
3. Ketersediaan Lahan Pelabuhan
14. Pelayanan Tambat Labuh
15. Produksi Perikanan

16. Frekuensi Kunjungan Kapal
17. STBLK
18. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
19. Fasilitas Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan, Perkarantinaan Ikan, Publikasi
20. Pelaksanaan K5
21. Penyaluran Air Bersih (kapal dan industri pengolahan)
22. Penyaluran Es (Kapal)
23. Penyaluran BBM (kapal)
24. Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan di WKOPP
25. Pemanfaatan Lahan Pelabuhan
26. Penyerapan tenaga Kerja
27. Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan

Berikut adalah capaian indikator kinerja PPN Pemangkat

Tabel 4. Capaian IK Kinerja PPN Pemangkat

SS-3				Pengelolaan PPN Pemangkat yang Berdaya Saing						
IKU-4				Tingkat Kinerja PPN Pemangkat						
Realisasi Triwulan IV (YoY)				2024					Renstra 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Capaian thd Target Tahunan	% Capaian thd Target Triwulan IV	Target 2024	%Capaian thd Target 2024
80,00	83,79	86,16	88,00	84,00	84,00	97,25	115,77	115,77	84,00	115,77

Berdasarkan tabel di atas, didapat bahwa realisasi capaian IKU Tingkat Kinerja adalah 97,25 atau persentase capaian sebesar 115% dari target Triwulan IV yang telah ditentukan. Perlu disampaikan bahwa target triwulan, tahunan maupun target renstra adalah sama yakni 84.

Dari sisi anggaran, terdapat pagu sebesar Rp. 219.610.000,00 untuk operasional kegiatan mendukung IKU Tingkat Kinerja Pelabuhan, kegiatan diantaranya adalah Pelaksanaan tata kelola dan operasional PIPP di pelabuhan perikanan, Pelaksanaan tata kelola dan operasional cara penanganan ikan yang baik (CPIB) dan Inspeksi Pembongkaran ikan di pelabuhan perikanan, Penerapan ISO 9001:2015 di Pelabuhan Perikanan, Fasilitasi akses pendanaan usaha nelayan melalui lembaga keuangan (perbankan dan non perbankan).

Sarana penunjang pemungutan PNBP Pelabuhan Perikanan dan Penugasan Delegasi RI pada pertemuan the Regional Seminar and Capacity Building on Blue Ports Initiative (BPI) in Asia, FAO 2024. Sampai dengan akhir Triwulan IV 2024 telah terealisasi sebesar Rp 199.358.200,00 atau dengan persentase sebesar 90,78%.

Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian IKU ini adalah dengan :

1. peningkatan kompetensi petugas operator aplikasi PIPP melalui Bimtek;
2. Penggunaan aplikasi DAPOOR untuk penyediaan data Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat;
3. Penggunaan aplikasi PEDATI untuk pendataan hasil pembongkaran ikan;
4. Penginputan data hasil produksi perikanan yang secara kontinu pada aplikasi PIPP.

IK. 4. TINGKAT PELAYANAN KESYAHBANDARAN PELABUHAN PERIKANAN

Indikator Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan merupakan indikator yang menunjukkan jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan, jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan yang diterbitkan dan jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan yang diterbitkan. Adapun pembobotannya adalah sebagai berikut :

1. Jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan (bobot 40%);
2. Jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan (STBLK) yang diterbitkan (bobot 40%);
3. Jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) yang diterbitkan (bobot 20%).

Tabel 5. Capaian IK Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan

SS-3				Pengelolaan PPN Pemangkat yang Berdaya Saing						
IKU-5				Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan (Persen)						
Realisasi Triwulan IV (YoY)				2024					Renstra 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target Tahunan	Terget Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Capaian thd Target Tahunan	% Capaian thd Target Triwulan IV	Target 2024	%Capaian thd Target 2024
-	-	-	100	100	100	100	100	100	-	-

Capaian IKU adalah 100% jika dibandingkan dengan target tahunan. Capaian IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya karena IKU Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran adalah IKU yang baru muncul pada tahun 2024. Pada tahun 2024 capaian IKU Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran adalah 100%. Capaian IKU Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran tidak dapat dibandingkan dengan target Renstra karena merupakan IKU baru.

Capaian IKU Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPN Pemangkat tahun 2024 telah memenuhi target. Hal ini dikarenakan jumlah penerbitan SPB, STBLKK, dan SHTI sama dengan jumlah permohonan yang masuk, sehingga semua kapal yang beraktifitas di PPN Pemangkat telah dilayani oleh tim pelayanan kesyahbandaran sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. PPN Pemangkat juga telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 tentang Manajemen Mutu, yang menekankan agar pelayanan publik harus sesuai standar. Disamping itu PPN Pemangkat juga telah meraih predikat WBK dimana pelayanan publik menjadi salah satu aspek penilaian sehingga menuntut semua petugas pelayanan dapat memberikan pelayanan yang prima.

Dalam mendukung pencapaian IKU ini, pagu anggaran telah disiapkan sebesar Rp. 274.660.000,00. Adapun peruntukannya antara lain untuk kegiatan Pelaksanaan Tata kelola dan Operasional kesyahbandaran di pelabuhan perikanan, Pelaksanaan Tata Kelola dan Operasional Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) di Pelabuhan Perikanan dan Pengumpulan dan Verifikasi Data Logbook penangkapan Ikan. Sampai dengan akhir triwulan IV 2024, telah terealisasi beberapa kegiatan dengan angka serapan sebesar Rp 242.858.000,00 atau dengan persentase serapan sebesar 88,42%.

Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung capaian ini diantaranya yakni :

1. Penggunaan aplikasi Teman SPB dalam pelayanan kesyahbandaran;
2. Petugas secara rutin melakukan rekonsiliasi data SPB, STBLK dan SHTI; dan
3. Petugas melakukan pelayanan dengan baik pada pengguna jasa.



Capaian Kinerja Kesyahbandaran Tahun 2024

IK. 5. NILAI PENGENDALIAN PENGEMBANGAN FASILITAS PELABUHAN PERIKANAN (PERSEN)

Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. Pelabuhan perikanan yang telah beroperasi dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhannya. Indikator ini merupakan indikator kinerja baru sesuai dengan perubahan perjanjian kerja kedua.

Adapun perhitungannya didasarkan pada persentase pengembangan fasilitas yang telah dilakukan dibandingkan dengan master plan yang dimiliki oleh PPN Pemangkat. Capaian indikator tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. Capaian IK Nilai Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan (Persen)

SS-4				Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas PPN Pemangkat yang Optimal						
IKU-6				Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan (Persen)						
Realisasi Triwulan IV (YoY)				2024					Renstra 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Capaian thd Target Tahunan	% Capaian thd Target Triwulan IV	Target 2024	%Capaian thd Target 2024
-	-	-	175	40,00	40,00	45,21	113,03	113,03	-	-

Capaian Indikator Kinerja Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas adalah sebesar 113% dari target tahunan sebesar 40%. Bercermin pada keberhasilan PPN Pemangkat dalam IKU Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas pelabuhan perikanan karena telah dilakukan perbaikan dan pemeliharaan fasilitas pada tahun 2024 dengan baik seperti pengadaan dan pemeliharaan lampu jalan, pemeliharaan jalan komplek, perbaikan dan penambahan jaringan (bandwidth) internet, pemeliharaan dan penambahan jaringan CCTV, perbaikan drainase, pemeliharaan dan perbaikan jaringan air bersih, pemeliharaan dermaga dan pemeliharaan pagar keliling.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada IKU Persentase Pengendalian Pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan ini disebabkan bertambahnya SDM dari penambahan ASN (PNS dan PPPK) sehingga dapat bekerja dengan baik. Selain itu adanya pembagian tugas kepada anggota Tim Kerja TKPU sebagai penanggung jawab untuk setiap item pekerjaan. Dari segi anggaran, untuk mendukung kegiatan pada IKU ini terdapat pagu anggaran sebesar Rp. 1.425.025.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.421.157.408,00 atau dengan persentase sebesar 99,73%. Anggaran tersebut telah digunakan untuk kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Pengadaan dan Rehabilitasi prasarana perkantoran.

IK. 6. KAPAL PERIKANAN IZIN DAERAH YANG MEMENUHI KETENTUAN

Indikator kinerja ini menunjukkan Jumlah dokumen kapal perikanan (sertifikat kelaikan kapal) yang diterbitkan oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat. Indikator ini mengalami perubahan nomenklatur, pada perjanjian kinerja awal dan perubahan pertama penamaannya adalah Dokumen Kapal Perikanan yang Diterbitkan.

Perubahan penamaan atau nomenklatur juga diikuti oleh perubahan pola perhitungannya. Sebelumnya yang menjadi satuan perhitungan adalah berupa dokumen sertifikat yang diterbitkan, sementara untuk perubahan kedua satuannya berganti menjadi kapal. Capaian indikator dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. IK Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan

SS-5				Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di PPN Pemangkat							
IKU-8				Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan							
Realisasi Triwulan IV (YoY)				2024					Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Capaian thd Target Tahunan	% Capaian thd Target Triwulan IV	Target 2024	%Capaian thd Target 2024	
-	87,5	248	450	490	490	496	101	101	35	1.417	

Capaian IKU Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan pada triwulan IV adalah 496 kapal dari target tahunan sebesar 490 kapal, sehingga jika dibandingkan dengan target tahunan maka persentase capaian sebesar 101,22% dan jika dibandingkan dengan target pada Renstra 2024 maka persentasenya adalah 1.417%.

Tingkat ketercapaian IK ini dikarenakan patuhnya kapal perikanan dalam mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) sebelum masa berlakunya berakhir. Disamping itu, dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.1569/MEN-KP/X/2023 tentang Tahapan Pelaksanaan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Pada Tahun 2023, sangat membantu pemilik kapal karena pemilik kapal dapat mengajukan pembaruan SKKP tanpa proses pemeriksaan kelaikan dan masa berlaku SKKP tersebut lebih panjang dari sebelumnya hingga sampai dengan 31 Desember 2024. Disamping itu, tingkat capaian ini dipengaruhi banyaknya pengajuan penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) dari kapal perikanan izin daerah yang berada di Pelabuhan Binaan seperti PP Kuala Singkawang, PPP Sungai Rengas, dan PP Sungai Kakap.

SKKP merupakan salah satu dokumen persyaratan dalam proses penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Dalam mendukung pencapaian IKU dokumen kapal perikanan yang diterbitkan didukung dengan tim SKKP yang terdiri dari 1 orang penanggung jawab, 1 orang koordinator dan 5 orang verifikator. Kesemuanya masuk kedalam surat tugas kepala Pelabuhan Nomor B.2152/PPN.PMK/KP.440/VIII/2023. Guna mendukung kegiatan pada IKU ini diberikan pagu anggaran sebesar Rp. 25.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 24.850.000,00 atau dengan persentase sebesar 99,40% untuk mengakomodir kegiatan penerbitan sertifikat kapal perikanan.

IK. 7. PERSENTASE PENINGKATAN PENGETAHUAN KOMPETENSI DAN PERLINDUNGAN NELAYAN/AWAK KAPAL PERIKANAN

Indikator ini merupakan indikator yang menunjukkan persentase awak kapal perikanan yang bersertifikasi kompetensi layak laut, layak tangkap dan layak simpan serta yang memiliki dokumen perlindungan awak kapal perikanan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan.

Adapun formula perhitungannya adalah persentase jumlah awak kapal yang memiliki PKL atau e-PKL dan telah tersertifikasi dibandingkan dengan seluruh jumlah awak kapal yang memiliki PKL atau e-PKL. Sesuai dengan manual IKU, pelaporan IK ini bersifat tahunan dan disajikan pada laporan Triwulan IV.

Tabel 7. IK Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan

SS-6				Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di PPN Pemangkat						
IKU-9				Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)						
Realisasi Triwulan IV (YoY)				2024					Renstra 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Capaian thd Target Tahunan	% Capaian thd Target Triwulan IV	Target 2024	%Capaian thd Target 2024
25	24	245	17,78	12,00	12,00	17,16	143,00	143,00	-	-

Capaian indikator Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan pada tahun 2024 telah memenuhi target yaitu dengan capaian sebesar 17,16 dari target tahunan sebesar 12 atau sebesar 143%. Pada tahun 2024 jumlah awak kapal yang telah tersertifikasi sejumlah 255 orang, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan jumlah awak kapal yang tersertifikasi pada tahun tahun sebelumnya.

Pelaksanaan Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi secara rutin kepada awak kapal perikanan atau pemilik kapal tentang pentingnya sertifikasi kompetensi dan perlindungan bagi awak kapal perikanan. Selain itu Sosialisasi dan Asistensi Buku Pelaut bagi Awak Kapal Perikanan dan E-PKL juga merupakan faktor penentu keberhasilan IK ini serta semakin tingginya kesadaran nelayan sebagai pelaku utama dan pemilik kapal sebagai pelaku usaha, ketersediaan petugas kesyahbandaran sebagai fasilitator Perjanjian Kerja Laut (PKL). Petugas telah melaksanakan PKL dengan beberapa nelayan yang difasilitasi oleh PPN Pemangkat.

Keberhasilan Sosialisasi terkait perlindungan awak kapal perikanan oleh Tim Kerja Kesyahbandaran PPN Pemangkat dan antusiasme nelayan dan kesadaran terkait risiko kerja di kapal perikanan menyebabkan banyaknya nelayan mendaftarkan diri ke BPJS Ketenagakerjaan. Juga andil pemilik kapal mengajak diskusi seluruh ABK kapalnya agar mau menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang kemudian disahkan oleh Syahbandar di PPN Pemangkat. Sehingga persentase Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan mencapai target. Pagu anggaran yang disiapkan untuk mendukung kelancaran kegiatan ini adalah sebesar Rp.13.000.000,00. Anggaran tersebut untuk mendukung nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuannya/kompetensinya dibidang sarana penangkapan ikan, dan sampai akhir triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 12.910.000,00 atau dengan persentase sebesar 99,31%.

IK. 8. NILAI PM PEMBANGUNAN ZI PPN PEMANGKAT

Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Indikator kinerja ini merupakan penilaian pembangunan ZI menuju WBK yang mencakup 6 (enam) area pengungkit dan 2 (dua) area komponen hasil yang mengacu kepada Juknis Pengawasan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Data dukung berupa Lembar Kerja Evaluasi (LKE).

Tabel 8. IK Nilai PM Pembangunan ZI PPN Pemangkat

SS-7				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pemangkat							
IKU-10				Nilai PM Pembangunan ZI PPN Pemangkat							
Realisasi Triwulan IV (YoY)				2024					Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Capaian thd Target Tahunan	% Capaian thd Target Triwulan IV	Target 2024	%Capaian thd Target 2024	
82,41	62,13	77,00	90,90	80,00	80,00	92,52	115,65	115,65	75,07	123,24	

Berdasarkan Penilaian Mandiri Zona Integritas yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Mandiri ZI PPN Pemangkat, didapat realisasi nilai pada tahun 2024 adalah 92,52 dengan prosentase 115,65% dari target yang ditetapkan yakni 80. Jika dibandingkan dengan capain tahun sebelumnya, capaian nilai PM Zona Integritas PPN Pemangkat mengalami tren kenaikan.

IKU PM Pembangunan ZI PPN Pemangkat Realisasi Kinerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi di PPN Pemangkat ini sejalan dengan Isi Renstra Tahun 2024 pada tujuan Pembangunan Perikanan Tangkap di PPN Pemangkat salah satunya pelaksanaan dan penerapan ZI WBK. Berdasarkan Penilaian Mandiri Zona Integritas yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Mandiri ZI PPN Pemangkat, didapat realisasi nilai pada tahun 2024 adalah 92,52 dari target yang ditetapkan yakni 80. Capaian target Tahun 2024 dapat terlampaui dikarenakan perolehan nilai yang jauh melampaui target untuk beberapa kategori, yaitu:

- Penataan Tata Laksana dengan nilai dokumen pengungkit sebesar 3,14 > target 2,80, nilai reform sebesar 3,0 > target 2,80;
- Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur dengan nilai dokumen pengungkit sebesar 4,31 > target 4,00, nilai reform sebesar 5,0 > target 4,00
- Penguatan Akuntabilitas dengan nilai dokumen pengungkit sebesar 4,74 > target 4,00, nilai reform sebesar 5 > target 4,00;
- Penguatan Pengawasan dengan nilai dokumen pengungkit sebesar 5,93 > target 6,00, nilai reform sebesar 7,5 > target 6,00;
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan nilai dokumen pengungkit sebesar 5,00 > target 4,00, nilai reform 4,47 > target 4,00.

Dalam pelaksanaan ZI WBK di PPN Pemangkat, terdapat beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan IKU tersebut, antara lain:

1. Adanya rapat yang dilakukan secara berkala agar terkontrolnya progress pemenuhan data dukung;
2. Adanya pengerjaan dokumen data dukung yang sesuai dengan apa yang telah disyaratkan dalam LKE;
3. Terlaksananya kegiatan-kegiatan yang menunjang Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi.

IK. 9.TINGKAT KEPATUHAN PENGADAAN BARANG/JASA PPN PEMANGKAT

Indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat adalah suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- 1.Rencana umum pengadaan telah diupload dalam aplikasi SIRUP (20%);
- 2.Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%);
- 3.Laporan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa (20%); dan
- 4.Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Tabel 9.Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa

SS-7				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pemangkat						
IKU-14				Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPN Pemangkat						
Realisasi Triwulan IV (YoY)				2024					Renstra 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Capaian thd Target Tahunan	% Capaian thd Target Triwulan IV	Target 2024	%Capaian thd Target 2024
-	89,06	76,80	81,88	80,00	80,00	96,29	120,36	120,36	75,00	128,39

IKU ini dilaporkan pada triwulan IV 2024 dengan target 80 sesuai dengan target tahunan dan tercapai 96,29 atau sebesar 120,4% dari target tahunan, dan capaian sebesar 128,39% dari target Renstra. Capaian IK Tingkat Kepatuhan PBJ ini sama untuk seluruh UPT lingkup DJPT sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 6/ITJ.0/TU.140/I/2025, tanggal 3 Januari 2025, hal Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup KKP Tahun 2024.

Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa telah melakukan identifikasi kegiatan Barang/Jasa pada akhir tahun 2023 sehingga pelaksanaan pengadaan barang jasa dapat sesuai dan tepat sasaran. Indikator ini menitikberatkan pada ketepatan waktu pelaporan dan kesesuaian kelengkapan dokumen yang diunggah pada aplikasi SIRUP dan kesesuaian pelaksanaan pengadaan barang/jasa di PPN Pemangkat. Pengadaan barang/jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki kedudukan berarti dalam penerapan pembangunan nasional guna meningkatkan pelayanan publik serta mengembangkan perekonomian baik nasional maupun daerah. Seiring berkembangnya situasi kondisi perekonomian dunia maupun dalam negeri yang tidak menentu, perlu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) serta kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan dan penerapan tersebut dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

Kegiatan perencanaan pada tahun 2024 direviu oleh UK PBJ KKP dan Inspektorat Jenderal sehingga proses tender memerlukan waktu yang lebih lama. Dengan adanya reviu perencanaan pengadaan barang/jasa sehingga dokumen tender menjadi valid. Proses pengadaan barang sudah dilakukan dengan menyesuaikan jenis dan spesifikasinya yang memenuhi komponen TDKN melalui e-purchasing sehingga dapat diproses sesuai peraturan yang berlaku. Langkah yang akan dilaksanakan yaitu melaksanakan koordinasi terkait reviu perencanaan ke UK PBJ KKP dan Inspektorat Jenderal. Dalam mendukung ketercapaian IKU ini, SDM yang terlibat adalah 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan 1 (satu) orang Pejabat Pembuat Komitmen. Keterbatasan SDM yang memiliki sertifikat PBJ dan PPK sehingga pelaksanaan keduanya ditugaskan pada pegawai dengan jabatan fungsional P3T dan AP3T yang telah memiliki sertifikat tersebut. Dalam hal anggaran, IKU ini diberikan pagu anggaran sebesar Rp. 4.896.000,00 untuk melaksanakan kegiatan Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor (Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa). Sampai dengan akhir Triwulan IV 2024, telah terealisasi sebesar Rp. 4.896.000,00 atau dengan persentase serapan sebesar 100%.

IK. 10. TINGKAT KEPATUHAN PENGELOLAAN BMN PPN PEMANGKAT

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur sebagai berikut :

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) (bobot 10%);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 balik ke penggunaan barang dan pengelolaan barang (bobot 25%);
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (reevaluasi aset) (bobot 20%) ;
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal didukung Berita Acara Serah Terima (BAST) / Berita Acara Pemakaian (Bobot 25%); dan
5. Penyusunan Laporan BMN (semesteran dan tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).

Tabel 10. Capaian IK Tingkat Kepatuhan BMN

SS-7				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pemangkat							
IKU-15				Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPN Pemangkat							
Realisasi Triwulan IV (YoY)				2024					Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Capaian thd Target Tahunan	% Capaian thd Target Triwulan IV	Target 2024	%Capaian thd Target 2024	
-	96,25	96,25	93,75	80,00	80,00	90,00	112,50	112,50	75,00	120,00	

IKU ini dilaporkan pada Triwulan IV 2024 berdasarkan hasil evaluasi Itjen pada satker DJPT secara menyeluruh dengan target 80,00 dan capaian sebesar 90,00, atau sebesar 112,50% dari target tahunan, dan jika dibandingkan dengan target pada Renstra sebesar 120%.

Hambatan dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu banyak BMN yang rusak berat tetapi masih tercatat pada SIMAK BMN dan belum dilakukan penghapusan. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu pelelangan barang dengan kondisi rusak berat melalui KPKNL. Serta telah ditetapkan PSP terhadap bangunan dan peralatan yang pengadaannya pada tahun 2023 dan melakukan inventarisasi BMN. Pelaksanaan IKU ini didukung oleh sumber daya anggaran dan sumber daya manusia.

Pagu anggaran yang disiapkan untuk mendukung IKU ini adalah sebesar Rp. 4.320.000,00 diperuntukan dalam kegiatan Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Dan Barang Milik Negara (BMN) (Honorarium pengurus/penyimpan BMN tingkat kuasa pengguna barang). Sampai dengan akhir Triwulan IV tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp. 4.320.000,00 atau dengan persentase serapan sebesar 100%.

Sumber daya manusia yang mendukung penuh IKU ini adalah 2 (dua) orang pengelola BMN dan dibantu oleh pegawai yang menangani sarana dan prasarana. Kegiatan yang menunjang tercapainya indikator ini adalah Pelaporan Keuangan dan BMN. Inventarisasi BMN serta kegiatan lain berupa pemeliharaan, peningkatan nilai dari aset yang dilakukan oleh PPN Pemangkat. Melaksanakan penghapusan BMN setelah menerima surat persetujuan penghapusan BMN, melakukan revisi RKBMN sesuai dengan kebutuhan organisasi.

IK. 11. NILAI SKM LINGKUP PPN PEMANGKAT

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (Permen PAN dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)/ diukur dengan melihat hasil perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur), U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5, Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon, U7 Kemudahan Fitur/Kemampuan Petugas, U8 Kualitas Isi/Sarana, U9 Layanan Konsultasi). Hasil perhitungan diperoleh dari aplikasi SISUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN KKP sebagai tindak lanjut pengisian SKM di lingkup KKP.

Tabel 11 Capaian IK Nilai SKM

SS-7				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pemangkat						
IKU-18				Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup PPN Pemangkat						
Realisasi Triwulan IV (YoY)				2024					Renstra 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target Tahunan	Terget Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Capaian thd Target Tahunan	% Capaian thd Target Triwulan IV	Target 2024	%Capaian thd Target 2024
-	-	-	90,68	88,3	88,3	92,92	105	105	-	-

Capaian SKM pada Triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar 92,92 dari target yang telah ditentukan sebesar 88,3 sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 105,23%. Target triwulan maupun target tahunan sama, sehingga persentase capaiannya sama sebesar 105,23%. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023 maka terjadi kenaikan.

Nilai ini diperoleh atas upaya PPN Pemangkat dengan memperbaiki dan meningkatkan fasilitas, kompetensi SDM serta mendorong kepada setiap petugas layanan untuk selalu melakukan pengisian SKM pada setiap selesai melakukan pelayanan. Selain itu, petugas pelayanan juga wajib memberikan pendampingan kepada pengguna jasa pada saat melakukan pengisian SKM sehingga tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam menjawab pertanyaan pada form SKM. Guna mendukung kegiatan didukung oleh 17 petugas pelayanan dan dibentuk SK Tim yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SKM 2024.

Disamping itu juga adanya penambahan SDM (PNS dan PPPK) sehingga beberapa pelayanan yang dahulu hanya ditangani 1 orang, saat ini dapat dilaksanakan oleh beberapa orang dan berakibat pada peningkatan pelayanan yang menjadi lebih baik Kegiatan yang menunjang tercapainya indikator ini antara lain;

- (1) Melakukan peningkatan fasilitas,
- (2) Membentuk tim yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan SKM dan
- (3) Melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan SKM kepada petugas dan pengguna jasa.

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada IKU ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 3.488.814.000,00 . Sampai akhir triwulan IV 2024 terealisasi sebesar Rp. 3.189.599.710,00 atau sebesar 91,42%.

Infografis Nilai SKM PPN Pemangkat Tahun 2024





BAB IV KEGIATAN KESYAHBANDARAN OPERASIONAL & PENGUSAHAAN



A. KEGIATAN KESYAHBANDARAN

Dalam rangka mewujudkan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi perikanan terpadu, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat terus berupaya meningkatkan kapasitasnya baik dari segi fasilitas yang dimiliki maupun ragam pelayanan yang disediakan. Sejak beroperasi dari tahun 1982, sampai dengan saat ini telah banyak mengalami kemajuan baik dari segi fasilitas, maupun kinerja dalam memberikan pelayanan jasa.

Kegiatan Kesyahbandaran, operasional dan Tata kelola pelayanan usaha dilaksanakan sesuai dengan fungsi pemerintahan dan fungsi perusahaan yang melekat pada Pelabuhan Perikanan, yang diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2024 sebagai berikut.

4.1. SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB)

Pelayanan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dilaksanakan di Gedung Pelayanan Terpadu dimana prosedur penerbitannya melibatkan instansi terkait, sehingga kapal perikanan akan mendapatkan SPB apabila kapal tersebut laik laut, laik tangkap dan laik simpan. Instansi terkait yang dimaksud adalah BPJS Ketenagakerjaan, Satwas SDKP Sambas, Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Pelaksanaan pelayanan penerbitan SPB dilakukan dengan pemeriksaan ulang terhadap kelengkapan dokumen kapal perikanan, pemeriksaan teknis, nautis, alat tangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan, pemeriksaan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan.

Pelayanan SPB di PPN Pemangkat telah berbasis online melalui aplikasi E-PIT. Aplikasi e-PIT merupakan teknologi yang diinisiasi KKP untuk kemudahan dan efektivitas pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pascaproduksi, serta kebijakan PIT bagi kapal penangkap dan pengangkut ikan.

Jumlah pelayanan SPB yang dilakukan PPN Pemangkat sampai dengan akhir Desember tahun 2024 sebanyak 1.555 SPB.

4.2. LOGBOOK PENANGKAPAN IKAN

Pelaksanaan pendataan Log Book Penangkapan Ikan merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 33/PERMEN-KP/2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, Dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan.

Tujuan Log Book Perikanan adalah:

1. Log Book sebagai landing declaration dari nahkoda, atau surat pernyataan mengenai ikan yang dibawa ke pelabuhan perikanan.
2. Log Book perikanan mendukung pendataan statistik perikanan (wilayah penangkapan, jenis ikan, volume).
3. Log Book perikanan mencatat data izin penangkapan (alat tangkap), data registrasi kapal (LxBxD; Power), pelabuhan pangkalan kapal tersebut.
4. Mendukung evaluasi dan analisa pengelolaan SDI (fishing capacity, efficiency fishing, musim penangkapan kaitannya dengan open and close session, dan konservasi).

Hasil pelaksanaan pendataan Log Book penangkapan Ikan yang diperiksa oleh petugas Syahbandar perikanan pada saat kedatangan kapal sampai dengan akhir bulan Desember 2024 adalah sebanyak 843 Log Book.

Sesuai dengan Peraturan Ditjen Perikanan Tangkap No. 11/PER- DJPT/2019 tentang kewajiban penggunaan e-logbook bagi kapal ukuran > 30 GT, maka mulai November 2019 beberapa kapal ukuran > 30 GT maupun kapal ukuran < 30 GT telah melakukan aktivasi e-logbook.

Jumlah pelayanan logbook penangkapan ikan sampai dengan akhir Desember tahun 2024 sebanyak 843 logbook.

4.3. PELAYANAN PENERBITAN SKKP

Pelayanan penerbitan Sertifikat kelaikan kapal perikanan (SKKP) merupakan tindak lanjut dari amanah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa setiap kapal perikanan yang akan beroperasi harus memenuhi persyaratan kelaikan kapal perikanan.

Pada prinsipnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberi kemudahan akses mengurus sertifikat kelaikan kapal perikanan (SKKP). Layanan ini dapat diakses secara online dan melalui layanan di pelabuhan perikanan serta gerai layanan terpadu.

Melalui SKKP, kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dinyatakan telah memenuhi aspek kelaiklautan, kelaiktangkapan dan kelaiksimpanan, sehingga telah sesuai persyaratan dan keselamatan untuk berlayar di laut.

Selain itu, petugas juga memberikan sosialisasi mengenai kebersihan kapal perikanan, agar setiap kapal perikanan dapat menjaga kebersihan di atas kapal, sehingga terhindar dari berbagai kemungkinan penyakit yang dapat menyerang.

Penerbitan SKKP pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dilakukan oleh 4 orang petugas. Jumlah pelayanan perpanjangan SKKP periode tahun 2024 sebanyak 496 kapal. Realisasi ini merupakan akumulasi periode tahun 2023 sebanyak 450 kapal dan pada tahun 2024 sebanyak 46 kapal, dengan total pemeriksaan kelaikan sebanyak 46 kapal.



Pelaksanaan SKKP PPN Pemangkat

4.4 PENERBITAN SHTI - LA

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.13/MEN/2012 tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) secara eksplisit memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap selaku Otoritas Kompeten dalam penerbitan SHTI. Hal ini dilakukan oleh Indonesia selain untuk kelancaran ekspor dan mendukung penanganan IUU Fishing, juga membantu upaya pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Dengan SHTI, hasil tangkapan ikan mulai dari tahapan penangkapan, pengolahan, pengangkutan dan pemasarannya dapat dipastikan asal-usulnya.

Adanya kebijakan SHTI dapat membantu nelayan untuk memperlancar kegiatan perdagangan hasil tangkapan ikan dari laut oleh kapal penangkap ikan Indonesia dan/atau kapal penangkap ikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung dipasarkan keluar negeri seperti Uni Eropa. Sebagaimana diterangkan dalam pasal 6 PERMEN KP No. 13 tahun 2012 tentang Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan, penjelasan kewenangan tentang SHTI yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan memberikan kewenangan pelaksanaan SHTI kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) sebagai Otoritas Kompeten (OK), Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap selaku Otoritas Kompeten dalam pelaksanaan penerbitan SHTI, mendelegasikan kepada Otoritas Kompeten Lokal (OKL) yang terdiri dari Kepala Pelabuhan Perikanan yang merupakan Kepala dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mengingat pentingnya kebijakan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan sebagai syarat utama ekspor hasil perikanan tangkap, maka menjadi penting untuk menyelenggarakan kegiatan Pengelolaan dan Operasional SHTI di Pelabuhan Perikanan kepada para Pengurus/Operator kapal perikanan yang ada di wilayah PPN Pemangkat.

Sampai dengan akhir bulan Desember Tahun 2024 PPN Pemangkat telah melakukan penerbitan SHTI LA sebanyak 706 sertifikat.

4.5. ASURANSI NELAYAN & PERJANJIAN KERJA LAUT (PKL)

PKL (PERJANJIAN KERJA LAUT)

Perjanjian Kerja Laut, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah kesepakatan antara awak Kapal Perikanan dengan pemilik Kapal Perikanan atau operator Kapal Perikanan atau nakhoda Kapal Perikanan atau dengan agen Awak Kapal Perikanan yang memuat persyaratan kerja, jaminan kelayakan kerja, jaminan upah, jaminan kesehatan, jaminan asuransi kecelakaan dan musibah, jaminan keamanan, serta jaminan hukum yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen PKL yang disahkan pada tahun 2024 yakni sejumlah 2.336 dokumen PKL.

ASURANSI NELAYAN

Asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, serta Petambak Garam sebagai tertanggung, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atas terjadinya risiko yang dipertanggungkan. Kepesertaan Asuransi Nelayan di PPN Pemangkat periode tahun 2024 sebanyak 7.943 peserta Asuransi melalui BPJS Ketenagakerjaan.

PROGRES KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN (ASURANSI NELAYAN) TAHUN 2024		
No	Bulan	Jumlah Peserta (Orang)
1	Januari	325
2	Februari	136
3	Maret	311
4	April	493
5	Mei	931
6	Juni	959
7	Juli	967
8	Agustus	781
9	September	929
10	Oktober	984
11	November	783
12	Desember	344
	Jumlah	7.943

Data Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
(Asuransi Nelayan) Tahun 2024

B. KEGIATAN OPERASIONAL

Pelayanan SCPIB (Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik), SKN (Sertifikat Kecakapan Nelayan) sebagai tindak lanjut pemberlakuan terbitnya peraturan peraturan yang berlaku, implementasinya pada tahun 2024 di PPN Pemangkat.

4.6. SCPIB DAN SKN

SCPIB (SERTIFIKAT CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK)

CPIB (Cara Penanganan Ikan yang Baik) adalah pedoman atau tata cara penanganan ikan yang baik diatas kapal dengan menerapkan SOP penanganan ikan mulai dari ikan ditangkap, pencucian ikan, penanganan ikan diatas kapal oleh ABK, pembekuan ikan, dan penyimpanan/ pembekuan di dalam palka. SCPIB yang telah diterbitkan pada tahun 2024 yakni berjumlah 13 sertifikat.

SERTIFIKASI KECAKAPAN NELAYAN (SKN)

Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN) merupakan sertifikasi keterampilan bagi awak kapal perikanan untuk ABK pada kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 GT atau Nakhoda yang bekerja pada kapal perikanan berukuran lebih dari 5 GT s.d. 30 GT. Sepanjang tahun 2024 PPN Pemangkat telah melaksanakan 3 (tiga) kali bimbingan teknis dan menerbitkan 160 sertifikat.



4.7. FREKUENSI KAPAL BONGKAR

Frekuensi kapal yang melakukan bongkar muatan ikan di pelabuhan perikanan menjadi indikator penting dalam mengukur tingkat aktivitas perikanan, efisiensi distribusi hasil tangkapan, serta dampaknya terhadap ekonomi lokal.

Frekuensi bongkar muatan ikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti musim penangkapan, kondisi cuaca, regulasi perikanan, serta kapasitas pelabuhan dalam menampung dan mengelola hasil tangkapan.

Kegiatan kunjungan kapal di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat adalah dalam rangka pembongkaran hasil tangkapan. Jumlah kapal bongkar pada periode tahun 2024 sebanyak 1.017 kapal.

NO	PELABUHAN PERIKANAN	2024			
		Jumlah kapal	Trip	VOLUME (Kg)	NILAI (Rp)
12	PPN PEMANGKAT	831	1.017	8.912.707	185.893.972.252
JANUARI		58	75	509377,2	10.680.268.100
FEBRUARI		54	69	401499,7	9.238.663.000
MARET		49	75	471544,7	10.905.175.000
APRIL		41	46	310085	6.482.310.000
MEI		80	89	1268446	27.884.772.662
JUNI		74	85	1235041	29.275.369.700
JULI		76	87	900364,5	17.775.745.600
AGUSTUS		79	106	725574	14.171.572.190
SEPTEMBER		72	95	611137	12.026.959.000
OKTOBER		79	98	819875	15.856.125.000
NOPEMBER		95	108	881829	16.145.856.000
DESEMBER		74	84	777934	15.451.156.000

Frekuensi Kapal Bongkar PPN Pemangkat Tahun 2024



Dokumentasi Aktivitas Bongkar Ikan PPN Pemangkat

4.8. PRODUKSI & NILAI PERIKANAN

Produksi ikan dari kapal bongkar merupakan ikan hasil tangkapan kapal perikanan dengan alat tangkap pancing, jaring insang, pukot cincin, pancing cumi, dan pukot Tarik yang beroperasi di WPP 711. Produksi ikan yang didaratkan pada tahun 2024 sebesar 11.422.874 ton dari target yang ditetapkan ditahun 2024 yakni sebesar 12.132 ton. Sementara itu, target volume produksi tahun 2023 yang telah ditetapkan yakni sebesar 8.750 ton.

Nilai produksi ikan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang didaratkan Tahun 2024 sebesar Rp. 185.893.972.252,-.

Seiring pelaksanaan operasional produksi perikanan, PPN Pemangkat juga memiliki pelabuhan perikanan binaan dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pembinaan operasional guna mendukung kebijakan Penangkapan Ikan Terukur. Hal ini diperkuat implementasinya melalui dasar Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur.



Sumber : Aplikasi TERJALA PPN Pemangkat

4.9. INSPEKSI PEMBONGKARAN IKAN

Kegiatan inspeksi pembongkaran ikan di pelabuhan perikanan merupakan salah satu titik pengendalian mutu hasil perikanan tangkap (hulu), yang juga mendukung program industrialisasi perikanan tangkap. Inspeksi pembongkaran ikan bertujuan untuk menjamin dan memelihara konsistensi penerapan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sehingga ikan yang didistribusikan ke konsumen dapat terjamin mutu dan keamanannya. Kegiatan inspeksi pembongkaran ikan meliputi :

1. Pendataan hasil tangkapan yang didaratkan;
2. Penilaian cara penanganan ikan selama pembongkaran (*Good Handling Practices*);
3. Pengecekan Sanitasi dan Higienis Kapal Perikanan;
4. Pengecekan Sanitasi Tempat Pembongkaran Ikan;
5. Pengukuran suhu ikan pada saat pembongkaran di pelabuhan perikanan;
6. Pengukuran suhu palkah dan *check* dokumen pencatatan suhu refrigerator kapal;
7. Uji mutu ikan yang didaratkan secara organoleptik;
8. Pengujian bahan Kimia Berbahaya (*formalin*).

Inspeksi pembongkaran ikan di PPN Pemangkat ini dilakukan secara *sampling* pada setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan pembongkaran ikan di wilayah pelabuhan, baik yang melakukan pembongkaran ikan di dermaga maupun di tangkahan melalui jalur darat atau laut. Total jumlah kapal yang dilakukan inspeksi pembongkaran di PPN Pemangkat sepanjang tahun 2024 sebanyak 714 unit kapal. Standar suhu ikan segar adalah < 4 derajat dan suhu beku ikan -16 derajat.



Pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan selama kurun waktu tahun 2024 dilakukan sebanyak 714 unit kapal dari kapal yang mendaratkan hasil tangkapannya, atau persentase kapal yang diinspeksi mencapai 100%.

Adapun hasil temuan ketidaksesuaian yang harus diperhatikan antara lain ;

- Sebagian besar ABK dan pihak lain yang berada dalam keadaan merokok dan tidak menggunakan alas sepatu *boot* saat berada di kapal melakukan pembongkaran ikan.
- Masih terdapat kapal yang tidak melapisi bagian *dock* dengan bahan pelapis seperti karpet matras.
- Masih terdapat peralatan-peralatan yang berada di kapal dalam keadaan berkarat dan kotor.



Uji formalin adalah cara pengujian yang menggunakan suatu alat / bahan (test kit) untuk mengetahui kandungan zat kimia formalin didalam produk. Uji formalin ini sangat penting peranannya untuk mendeteksi kemungkinan pemakaian zat kimia berbahaya tersebut untuk mengawetkan ikan sejak di atas kapal Uji formalin adalah cara pengujian yang menggunakan suatu alat / bahan (test kit) untuk mengetahui kandungan zat kimia formalin didalam produk. Uji formalin ini sangat penting peranannya untuk mendeteksi kemungkinan pemakaian zat kimia berbahaya tersebut untuk mengawetkan ikan sejak di atas kapal sampai dengan pemasaran di lingkungan pelabuhan perikanan. untuk mengamankan ikan yang didaratkan dan produk-produk perikanan di PPN Pemangkat terhadap penggunaan formalin. Tindakan tersebut dituangkan dalam sebuah kegiatan pemeriksaan formalin terhadap jenis-jenis ikan yang didaratkan di PPN Pemangkat. Jumlah sampel yang diuji formalin selama tahun 2024 sebanyak 109 sampel dan hasil semuanya adalah negatif.

C. KEGIATAN PENGUSAHAAN

Kegiatan Pengusahaan di PPN Pemangkat telah terintegrasi melalui aplikasi **'Jalapukat'** (Jasa Layanan Usaha Pelabuhan Pemangkat). Melalui Aplikasi ini didalamnya mengintegrasikan data PNBP Non SDA yang terdiri dari layanan air bersih, alat/kendaraan, listrik, pas masuk, lahan/bangunan, serta layanan tambat labuh. Tarif yang dikenakan telah diatur sesuai dengan aturan PP No 85 Tahun 2021 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pada tahun 2024, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Non SDA PPN Pemangkat telah mengalami kenaikan signifikan dari tahun sebelumnya. Mulai dari penerimaan di sektor lahan dan bangunan, Pas Masuk harian maupun langganan, Jasa Listrik dan Air. Kenaikan signifikan ini, tidak terlepas dari adanya perbaikan sarana dan prasarana yang dilakukan selama 2024.

Data Capaian penerimaan PNBP Non SDA PPN Pemangkat dapat dilihat melalui gambar berikut.



Tampilan Jalapukat Data Rekapitulasi PNBP Non SDA Tahun 2024

10. PELAYANAN AIR BERSIH

Dalam menyediakan layanan Air Bersih. PPN Pemangkat memiliki fasilitas teknologi Seawater Reverse Osmosis (SWRO) yang dapat dipergunakan untuk penyediaan layanan kebutuhan air bersih bagi nelayan dan masyarakat umum. Pada tahun 2024, PPN Pemangkat terus melakukan perbaikan sarana layanan air bersih, hal ini dilakukan guna memberikan layanan yang prima dalam penyediaan kebutuhan air bersih baik bagi pengguna jasa maupun dengan masyarakat umum. Kualitas air yang dimiliki PPN Pemangkat ini juga secara konsisten dilakukan pengawasan keamanan kualitas air oleh PT. SUCOFINDO. Masyarakat dapat menggunakan fasilitas layanan air bersih ini dengan terlebih dahulu mengaksesnya melalui website <https://www.terjalappnpemangkat.com/jala-pukat/air-swro>.



Fasilitas Air Bersih PPN Pemangkat



Pendistribusian Layanan Air Bersih PPN Pemangkat



Penandatanganan perjanjian sewa lahan dan bangunan PPN Pemangkat Tahun 2024

NO	Fasilitas	Volume	Satuan	Kondisi	Pengelola Aset	Tahun Pengadaan
I. Fasilitas Pokok						
1	Tanah Pelabuhan	3,5	Ha	B	PPN Pemangkat	1996/1997
2	Dermaja Kayu	286	m	RR	PPN Pemangkat	1979
3	Dermaja Beton	66,67	m	B	PPN Pemangkat	1979
4	Jetty Kayu / Toriste	173,65	m	RR	PPN Pemangkat	1979
5	Dermaja Beton	89,60	m ²	B	PPN Pemangkat	1979/2014/2015
6	Kolam Pelabuhan	3.400	m ²	B	PPN Pemangkat	1979
7	Turap Beton	730,3	m ²	B	PPN Pemangkat	1980
8	Pelapisan Aspal Jalan Komplek	5.952,62	m ²	RR	PPN Pemangkat	2015
9	Drainase	5.900	m	RR	PPN Pemangkat	1980
10	Pengalok Sedimen/Groin	101	m	B	PPN Pemangkat	2002
11	Groin (Fungsi Sebagai Turap)	70	m	B	PPN Pemangkat	2015
12	Jalan Akses Parker Alat Berat	288	m ²	RR	PPN Pemangkat	2015
II. Fasilitas Fungsional						
1	TPI Higienis	558	m ²	B	PPN Pemangkat	2017
2	Instalasi Air Bersih	637,14	m ²	B	PPN Pemangkat	2005
3	SPON	50	m ²	B	PERUM	2004
4	Instalasi Listrik	179,5	kVA	B	PPN Pemangkat	1980
5	Sumur Artesis	1	unit	RB	PPN Pemangkat	1996
6	Genset	27,5	kVA	B	PPN Pemangkat	2011
7	Kantor Pelayanan Terpadu	257	m ²	B	PPN Pemangkat	1993/2015

Keterangan:
B: Baik | RR: Rusak Ringan | RB: Rusak Berat

NO	Fasilitas	Volume	Satuan	Kondisi	Pengelola Aset	Tahun Pengadaan
III. Fasilitas Fungsional						
8	Kantor Administrasi	452,64	m ²	B	PPN Pemangkat	2011
9	Pos Satpam 1	8.428	m ²	B	PPN Pemangkat	2012
10	Pos Satpam 2	20	m ²	B	PPN Pemangkat	2005
11	Pengalokan Ruan	944	m ²	B	Pemangkat Perum Perindo	1982
12	Kios BAP (di 10 unit)	180	m ²	B	PPN Pemangkat	2013
13	Instalasi Air Reverse Osmosis	1	unit	B	PPN Pemangkat	2013/AFBAP
14	Tempat Perbaikan Jaring	130	m ²	B	PPN Pemangkat	2013
15	Parker Motor	1	unit	B	PPN Pemangkat	2014
16	Parker Mobil	2	unit	B	PPN Pemangkat	2013
17	Tempat Parker Alat Berat	25	m ²	RR	PPN Pemangkat	2015
18	Perluasan Tempat Parker Alat Berat	88,8	m ²	B	PPN Pemangkat	2015
19	Pagar Kantor	86,5	m	B	PPN Pemangkat	2012
IV. Fasilitas Pemangkat						
1	Rumah Dinas Kalabuh	125	m ²	B	PPN Pemangkat	2000
2	Waserda (2 unit)	140	m ²	RR	PPN Pemangkat	1996
3	Rumah Dinas	70	m ²	RR	PPN Pemangkat	1979
4	Tempat Mandi	1	unit	B	PPN Pemangkat	2004
5	Pintu Gerbang (in & out)	2	unit	B	PPN Pemangkat	2005/2012
6	Toilet/MCK	1	unit	RB	PPN Pemangkat	2013
7	Tempat Sampah	12	m ²	B	PPN Pemangkat	2015

Daftar fasilitas PPN Pemangkat

4.12. PELAYANAN PAS MASUK

Peraturan Pemerintah No. 85 tahun 2021 Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tarif jasa tanda masuk pelabuhan atau PAS masuk pelabuhan dikategorikan yaitu PAS masuk harian dan langganan. Pas masuk harian terdiri dari pengecer ikan baik itu menggunakan sepeda motor maupun roda empat atau roda enam serta orang-orang yang keluar masuk pelabuhan, sedangkan PAS masuk langganan merupakan orang-orang yang terdiri dari agen ikan, ABK kapal, pengurus kapal dan para sub agen ikan yang ada dalam kawasan pelabuhan itu sendiri.

Jasa masuk pelabuhan untuk kendaraan meliputi, tanda masuk pelabuhan bagi kendaraan per sekali masuk dengan rincian untuk kendaraan roda 2 Rp. 2.000,- roda 4 Rp. 6.000,00 dan tanda masuk roda 6 Rp. 10.000,00. Proses transaksi PAS masuk non tunai atau menggunakan kartu elektronik.

Pendapatan Pas Masuk Harian pada tahun 2024 sebesar Rp. 219.290.000, dengan peningkatan 65% dari tahun sebelumnya total kendaraan Roda 2 sebanyak 69.729 dengan nilai Rp. 139.458.000 , Roda 4 sebanyak 11.562 dengan nilai 69.372.000 , Roda 6 sebanyak 1.046 dengan nilai 10.460.000 . Sementara itu, pendapatan Pas Masuk Langganan sebesar Rp. 149.670.000 . Peningkatan pendapatan Pas Masuk disebabkan oleh peningkatan penertiban dan perubahan sistem pada jasa pas masuk.

Peluang Perbaikan

Berdasarkan analisis, beberapa peluang perbaikan yang dapat dilakukan :

1. Meningkatkan penertiban dan pengawasan untuk mengurangi kebocoran pendapatan.
2. Mengembangkan sistem pas masuk yang lebih efisien dan efektif.
3. Meningkatkan promosi dan layanan kepada pengguna jasa pas masuk.

Analisa Pas Masuk menunjukkan bahwa pendapatan Pas Masuk Harian dan Langganan meningkat pada tahun 2024. Peningkatan pendapatan disebabkan oleh peningkatan penertiban dan perubahan sistem pada jasa pas masuk. Namun, masih ada peluang perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dan kinerja Pas Masuk.

Sementara itu, pas masuk berlangganan pada tahun 2024 dapat dilihat berdasarkan perbandingan capaian PNBP tahun 2023 terhadap capaian PNBP tahun 2024, dimana capaian PNBP tahun 2023 untuk pas masuk berlangganan dengan rincian :

- kendaraan gol I = Rp.74.640.000,-
- kendaraan gol II = Rp.16.830.000,-
- kendaraan gol III = Rp.18.750.000,-

dengan total sebesar Rp.110.220.000,- sedangkan capaian PNBP untuk pas masuk berlangganan tahun 2024 dengan rincian :

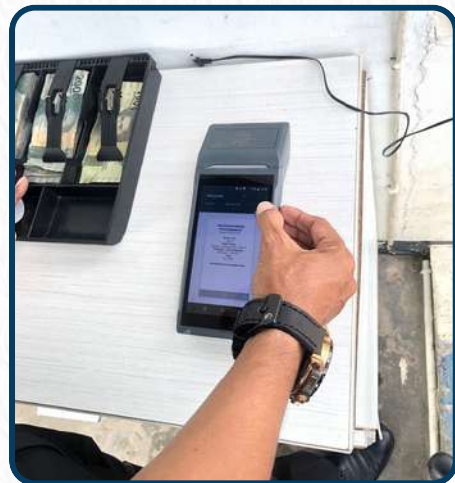
- kendaraan gol I = Rp.91.890.000,-
- kendaraan gol II = Rp.35.280.000,-
- kendaraan gol III = Rp.22.500.000,-

dengan total sebesar Rp. 149.670.000,-

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil analisis pas masuk berlangganan pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 39.450.000,- atau dengan persentase 35,8% dari tahun 2023.

hal ini di sebabkan beberapa faktor, diantaranya ;

1. Masyarakat dan pengguna jasa mulai tertib dengan pas masuk;
2. Berlangganan jauh lebih murah di banding harian;
3. Proses permohonan yang simpel dengan petugas yang cekatan;
4. Banyaknya pengguna jasa yang tertarik untuk masuk ke pelabuhan dengan cara berlangganan.



4.13. PELAKSANAAN SISTEM PUSAT INFORMASI PELABUHAN PERIKANAN (PIPP)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Bab VI mengenai Sistem Informasi dan Data Statistik Perikanan, Pasal 46 ayat (1) : “Pemerintah menyusun dan mengembangkan sistem informasi dan data statistik perikanan serta menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian dan penyebaran data potensi, sarana dan prasarana, produksi, penanganan, pengolahan dan pemasaran ikan dan pengembangan sistem bisnis perikanan”. Ayat (2) menyatakan bahwa : Pemerintah mengadakan pusat data dan informasi Perikanan untuk menyelenggarakan sistem informasi data statistik perikanan.

Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan merupakan sebuah pusat informasi tentang pelabuhan perikanan untuk pengembangan perikanan dan manajemen database berbasis pengelolaan sumberdaya ikan dan permintaan pasar dengan membangun suatu sistem komputerisasi pengelolaan database dan informasi tentang pelabuhan perikanan secara terpadu.

Perencanaan dan Pelaksanaan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan diselenggarakan untuk memenuhi fungsi-fungsi sebagai :

A. Dari sisi prasarana fisik :

- Perencanaan dan pengembangan pelabuhan perikanan
- Pengelolaan fungsional
- Manajemen pemeliharaan fisik

B. Dari sisi sosial ekonomi perikanan :

- Perencanaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan
- Perencanaan dan pengembangan pemasaran dan distribusi ikan

C. Dari sisi layanan informasi Perikanan :

- Memberikan informasi harian dan periodik tentang jenis & harga, produksi ikan; jumlah kapal perikanan dan nelayan serta informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan Operasional Pelabuhan Perikanan.

Dalam rangka memudahkan para nelayan dalam mendapatkan informasi kelautan, pusat informasi PPN Pemangkat telah memiliki alat publikasi informasi dari BMKG Maritim. Segala informasi mengenai PPN Pemangkat dapat diakses di situs : www.pipp.dkp.go.id dengan alamat e-mail: pemangkat_ppn@yahoo.com.

Dalam seksi operasional pengoperasian PIPP dilakukan oleh 2 orang operator dan sekaligus sebagai enumerator di lapangan. Pengoperasian PIPP sendiri terdiri dari input data harian, berita/ kegiatan yang berhubungan dengan operasional PPN Pemangkat.

Validasi data adalah langkah pemeriksaan untuk memastikan bahwa data tersebut telah sesuai kriteria yang ditetapkan dengan tujuan untuk memastikan bahwa data yang akan dimasukkan ke dalam basis data telah diketahui dan dapat dijelaskan sumber dan kebenaran datanya.

Proses validasi dilakukan setiap enam bulan sekali oleh validator pusat dengan mengundang utusan dari UPT terkait (PPN Pemangkat) ke kantor pusat/ provinsi. Data dipersiapkan antara lain : data hasil tangkapan harian kapal penangkap ikan baik dari input Produksi (PIPP) , Laporan Data Statistik Pelabuan Perikanan, Data – data perikanan tangkap dan pendaratan ikan lainnya yang relevan.

BAB V

INOVASI, CAPAIAN

KINERJA DAN

KEGIATAN TAHUN

2024



5.1 INOVASI

Dalam era modern ini, inovasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing suatu instansi. Instansi, baik pemerintah maupun swasta, harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang cepat dan dinamis di sekitarnya. Kemajuan teknologi dan perkembangan tren global menuntut setiap instansi untuk terus melakukan inovasi guna mengoptimalkan kinerja dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau pemangku kepentingan. Inovasi tidak hanya terbatas pada pengembangan produk atau layanan, tetapi juga mencakup perubahan dalam proses kerja, manajemen sumber daya, dan pendekatan strategis. Dalam konteks instansi, inovasi menjadi landasan untuk memperbaiki tata kelola, meningkatkan efektivitas, serta menghadirkan solusi kreatif dalam menanggapi perubahan lingkungan.

Keberhasilan suatu instansi dalam menerapkan inovasi dapat mengubah paradigma tradisional menjadi lebih progresif. Langkah-langkah inovatif dapat melibatkan pemanfaatan teknologi terkini, implementasi sistem informasi yang cerdas, pengembangan kebijakan yang responsif, dan pemberdayaan sumber daya manusia dengan keterampilan yang relevan. Melalui pemahaman mendalam terhadap konsep inovasi, instansi dapat menciptakan ekosistem yang mendukung perkembangan berkelanjutan, serta menghadirkan solusi yang berdaya saing di tengah dinamika perubahan zaman. Maka dari itu, diawal tahun 2024, PPN Pemangkat telah melakukan berbagai langkah inovasi, salah satunya dengan adanya aplikasi berbasis website yakni 'Terjala' atau Integrasi Pelayanan Jasa dan Pengolahan Data, yang merupakan Aplikasi berbasis web dan smartphone yang membantu dalam pelaksanaan tata kelola operasional, syahbandar dan pelayanan umum Pelabuhan perikanan khususnya PPN Pemangkat. Web apps PPN ini menjawab kebutuhan data yang akuntabel, efisien dan efektif dalam pelaksanaan tata kelola operasional, syahbandar dan pelayanan umum yang ada di PPN Pemangkat.

FILOSOFI TERJALA



Nama TERJALA berasal dari kata "jala" yang bisa diartikan sebagai "jaringan" atau "sistem yang terhubung". Nama ini dapat merujuk pada fungsi aplikasi untuk menghubungkan pengguna dengan informasi atau layanan yang mereka butuhkan, atau untuk menghubungkan pengguna dengan orang-orang dalam jaringan sosial mereka.

Filosofi dari nama "jala" dapat dihubungkan dengan konsep saling terhubung dan saling bergantung antara manusia dan alam, serta antara satu sama lain. Seperti jaring ikan yang dapat menangkap ikan-ikan yang saling berhubungan satu sama lain, aplikasi "terjala" dapat membantu pengguna terhubung dengan orang-orang dalam jaringan mereka, mengakses informasi yang relevan, dan memperluas kesempatan dan jaringan sosial mereka.

Untuk dapat mengakses ke halaman terjala masyarakat dapat mengaksesnya melalui <https://www.terjalappnpemangkat.com/home>

5.2 PENGHARGAAN

Dalam rentang waktu tahun 2024, PPN Pemangkat dengan bangga mencapai berbagai pencapaian. Melalui dedikasi, inovasi, dan kerjasama yang baik dengan para pemangku kepentingan, PPN Pemangkat menjadi salah satu UPT unggul, dibawah Ditjen Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pencapaian ini tidak terlepas dari visi dan misi PPN Pemangkat yang mengedepankan profesionalisme, transparansi, dan pelayanan yang prima. Melalui berbagai program strategis, PPN Pemangkat berkomitmen untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, baik dalam pelayanan operasional, kesyahbandaran, maupun layanan kepada pengguna jasa kepelabuhan.

Beberapa capaian penghargaan yang diraih PPN Pemangkat sepanjang tahun 2024, diantaranya yakni ;



Penghargaan Pengelolaan BMN Kategori Satker NUP Sedang

PPN Pemangkat mendapat penghargaan atas pelaksanaan Administrasi BMN yang andal (Kategori Satker NUP Sedang), Pontianak 30 Mei 2024.



Penghargaan Pengawasan Kearsipan Internal

PPN Pemangkat mendapat penghargaan atas Pengawasan Kearsipan Internal dengan kategori AA (sangat memuaskan), Jakarta 24 Juni 2024.



Penghargaan keterbukaan informasi publik dengan predikat informatif

PPN Pemangkat meraih penghargaan keterbukaan informasi publik dengan predikat informatif yang diserahkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Jakarta 4 April 2024.



Penghargaan Peringat IV Terbaik Kompetisi Layanan Publik Lingkup KKP

PPN Pemangkat meraih penghargaan Peringat IV Terbaik Kompetisi Layanan Publik Lingkup KKP dengan judul inovasi **TERJALA (INTEGRASI PELAYANAN JASA DAN PENGOLAHAN DATA)**, Jakarta, 14 Agustus 2024.



RESERTIFIKASI ISO 9001:2015 SISTEM MANAJEMEN MUTU

Pelayanan publik yang telah dilakukan resertifikasi, diantaranya yakni, pelayanan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP), Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK), Listrik, Tambat Labuh, dan Jasa Air Bersih (SWRO).

5.3 DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2024



BAKTI NELAYAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (KKP) BERSAMA ANGGOTA KOMISI IV DPR RI

Kepala PPN Pemangkat, Anam Tofani, mewakili Plt. Dirjen Perikanan Tangkap KKP bersama Anggota Komisi IV DPR RI, Yessy Melania melaksanakan kegiatan pendampingan, pelindungan, dan Pemberdayaan Nelayan (Bakti Nelayan) di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, Sabtu, 27 April 2024.



PERTEMUAN LEMBAGA PENGELOLA PERIKANAN WPPNRI 711

Kepala PPN Pemangkat, Anam Tofani menghadiri pembahasan panel diskusi pada pertemuan lembaga pengelola perikanan WPPNRI 711 di Batam, Selasa 14 Mei 2024, malam Waktu setempat. Pembukaan kegiatan ini nantinya akan dilaksanakan pada hari Rabu (15/5/2024).

Agenda pertemuan ini nantinya akan dihadiri sekitar 122 orang yang berasal dari unsur pemangku kepentingan, diantaranya dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, BPH MIGAS, PT. PERTAMINA, Akademisi bidang kelautan dan perikanan, serta pelaku usaha perikanan.



ANUGERAH REKSA BANDHA TAHUN 2023

PPN Pemangkat meraih penghargaan atas pelaksanaan Administrasi BMN yang Andal tahun 2023 untuk Kategori Satker NUP Sedang. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat, Tetik Fajar Ruwandari, dan diterima langsung oleh Kepala PPN Pemangkat, Anam Tofani, pada Acara Anugerah Reksa Bandha Tahun 2023 di Aula Kanwil DJKN Kalimantan Barat, Kamis 30 Mei 2024.



FESTIVAL PESISIR PALOH DAN KEMAH PEMUDA PESISIR 2024

Kepala PPN Pemangkat, Anam Tofani, beserta jajaran pegawai PPN Pemangkat menghadiri Festival Pesisir Paloh dan Kemah Pemuda Pesisir 2024 yang diselenggarakan oleh BPSPL Pontianak dari tanggal 27 Juni s.d 1 Juli 2024, bertempat di JS Villa & Resort Temajuk, Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

Pada kegiatan ini, PPN Pemangkat berpartisipasi dengan memberikan ikan melalui "Gerakan Makan Ikan" sebanyak 500 Kg kepada masyarakat.



PENGHARGAAN KEARSIPAN TAHUN 2023 LINGKUP INTERNAL KKP

PPN Pemangkat memperoleh peringkat delapan pada Penghargaan Nilai Terbaik Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2023 untuk kategori Lingkup UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan skor sebesar 93,98 dengan predikat AA atau sangat memuaskan.

Penyerahan piagam penghargaan atas hasil pengawasan kearsipan tersebut diterima langsung oleh Kepala PPN Pemangkat, Anam Tofani, pada kegiatan Rapat Koordinasi Kearsipan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024, yang diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat, pada Selasa 2 Juli 2024.



PENGHARGAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK LINGKUP KKP TAHUN 2023

Kepala PPN Pemangkat, Anam Tofani, menerima penghargaan keterbukaan informasi publik sebagai PPID pelaksana UPT dengan kualifikasi informatif dalam pelaksanaan forum keterbukaan informasi publik lingkup Kementerian kelautan dan perikanan tahun 2023, bertempat di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Kamis 25 Juli 2024.

Penghargaan ini diraih dari hasil penilaian monitoring evaluasi pelaksanaan PPID tahun 2023. PPN Pemangkat berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan informasi melalui kemudahan akses informasi untuk publik.



SIMULASI PEMADAMAN KEBAKARAN BAGI AWAK KAPAL PERIKANAN

Dalam rangka penanganan kebakaran, keselamatan dan keamanan kapal di Pelabuhan Perikanan, PPN Pemangkat Bersama dengan Basarnas Wilayah Kerja Sintete yang turut menjadi Narasumber pada kegiatan ini, melaksanakan kegiatan simulasi Pemadaman Kebakaran, pada hari Rabu, 16 Oktober 2024, bertempat di ruang rapat nelayan PPN Pemangkat.

Peserta kegiatan ini yakni Awak Kapal Perikanan (ABK) pada kapal perikanan yang beroperasi di PPN Pemangkat. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi dalam penanggulangan dan pencegahan bencana kebakaran di wilayah pelabuhan perikanan terutama di kapal perikanan.



LATIHAN SAR GABUNGAN (LATSARGAB) PERTOLONGAN KECELAKAAN KAPAL PERIKANAN

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Pontianak , Bersama dengan PPN Pemangkat menggelar Latihan SAR Gabungan (Latsargab) pertolongan kecelakaan kapal Perikanan, yang diselenggarakan di PPN Pemangkat, Rabu 30 Oktober 2024.

Latihan SAR Gabungan ini dilaksanakan selama dua hari, mulai dari tanggal 29 hingga 30 Oktober 2024. Dengan diikuti sekitar 57 personel Gabungan yang terdiri dari Basarnas, Potensi SAR, TNI/Polri, KSOP, sejumlah nelayan serta instansi terkait.



MAKAN BERGIZI GRATIS MENU IKAN DAN MINUM SUSU IKAN (SURIKAN)

Dalam rangka rangkaian HUT KKP ke 25 Tahun, PPN Pemangkat melaksanakan kegiatan makan bergizi gratis menu ikan dan Minum susu Ikan (SURIKAN), pada hari Selasa, 29 Oktober 2024, bertempat di kantor PPN Pemangkat.

Peserta kegiatan ini diantaranya dari Satwas SDKP Kab.Sambas, Dharma Wanita Persatuan PPN Pemangkat, SMK Negeri 1 Pemangkat, TK Negeri Pembina Pemangkat, Pegawai PPN Pemangkat, serta stakeholder lainnya, dengan jumlah peserta kurang lebih 100 orang.



SOSIALISASI TERKAIT PERATURAN KEPEGAWAIAN

PPN Pemangkat melaksanakan kegiatan Sosialisasi Terkait Peraturan Kepegawaian yang dilaksanakan, Kamis 21 November 2024, bertempat di ruang rapat nelayan PPN Pemangkat. Turut hadir pada kegiatan ini, seluruh pegawai PPN Pemangkat, yang dihadiri Narasumber oleh Analis SDM Aparatur Ahli Madya, Sekretariat DJPT, Bapak Adi Tejamakayasa.



KUNJUNGAN KERJA TIM DARI KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA (KADIN)

Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran, Ari Yumansyah, menerima kunjungan kerja tim dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Senin, 25 November 2024, bertempat di kantor Utama PPN Pemangkat.

Kunjungan kerja ini dalam rangka menindaklanjuti Kerjasama Ekonomi antara Indonesia dan Malaysia dalam kerangka Sosek Malindo yang telah di sepakati kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dalam Bidang Perikanan antara PT. Borneo Lautan Jaya dan SEDC Fisheries, Sdn, Bhd.



SOSIALISASI TECHNICAL COOPERATION GUIDELINES (TCG)

Dalam rangka menguatkan dukungan perikanan tangkap, Kepala PPN Pemangkat, Anam Tofani, mensosialisasikan kerjasama Indonesia dan Tiongkok pedoman kerjasama teknis/*Technical Cooperation Guidelines* (TCG) kepada instansi terkait dan juga stakeholder perikanan lainnya, yang dilaksanakan di Pemangkat, pada Selasa 10 Desember 2024.

TCG mencakup 12 bagian pengaturan kerja sama Indonesia - Tiongkok, diantaranya mengenai perusahaan patungan, kapal hingga kuota penangkapan ikan. Sedangkan ruang lingkup kerja sama yang akan dilakukan meliputi bidang penangkapan ikan dan pengolahan produk perikanan sesuai ketentuan hukum di Indonesia.



WEBINAR NASIONAL DHARMA WANITA PERSATUAN PPN PEMANGKAT

Dharma Wanita Persatuan PPN Pemangkat menyelenggarakan kegiatan Webinar Nasional dengan mengangkat Tema "Pendekatan Keluarga Terhadap Bahaya Narkoba Bagi Generasi Bangsa", yang dilaksanakan secara luring dan daring di Ruang Balai Jejaring Nelayan PPN Pemangkat, Selasa (17/12).

Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, anggota DWP PPN Pemangkat mengikuti secara luring di Balai Jejaring Nelayan PPN Pemangkat dan secara daring melalui zoom meeting diikuti oleh Ketua DWP KKP, Ibu Wie Rudy Heriyanto, Ketua DWP DJPT, Ibu Eviyanti Latif, DWP DJPB, serta seluruh DWP UPT Pelabuhan Perikanan.

PENGADUAN PPN PEMANGKAT

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan, senantiasa berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan Whistle Blowing System (WBS) secara baik dan maksimal dalam rangka mewujudkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Lingkungan PPN Pemangkat.

Pengaduan adalah salah satu bentuk pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh pegawai dari internal suatu instansi yang mencakup dugaan pelanggaran: 1. Penyalahgunaan wewenang; 2. Pelanggaran disiplin pejabat/pegawai; dan/atau 3. Hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat 4. Tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian.

Dalam implementasinya telah dilakukan sosialisasi tentang pengaduan masyarakat melalui apel pagi, media sosial facebook dan twitter, dengan substansi terkait sop penanganan pengaduan masyarakat sehingga pegawai PPN Pemangkat telah memahami penanganan pengaduan masyarakat. Tim SDM penanganan pengaduan masyarakat di PPN Pemangkat sudah ditunjuk melalui SK Tim UPG DJPT Kep Dirjen PT Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tim Penanganan Pengaduan Unit Kerja Eselon 1 dan Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.



Gambar Rekapitulasi Pengaduan PPN Pemangkat Tahun 2024

LAYANAN INFORMASI PELAYANAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Layanan Informasi Publik

Dapatkan informasi seputar standar operasional prosedur layanan Informasi Publik kami melalui **Scan QR Code** di bawah atau melalui link

<https://bit.ly/SOPInformasipublik>

Pindai di sini




BerAKHLAK

#bangga melayani bangsa

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELAYANAN PUBLIK PPN PEMANGKAT

Dapatkan informasi seputar standar operasional prosedur jenis pelayanan kami melalui **Scan QR Code** di bawah atau melalui link berikut:

<https://tinyurl.com/SOP-Pelayanan-PPN-Pemangkat>

Pindai di sini




BerAKHLAK

#bangga melayani bangsa

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

STANDAR PELAYANAN

PPN PEMANGKAT

Dapatkan informasi seputar standar pelayanan kami melalui **Scan QR Code** di bawah atau melalui link berikut:

<https://tinyurl.com/StandarPelayananPPNPemangkat>

Pindai di sini




BerAKHLAK

#bangga melayani bangsa

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ALUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PPN PEMANGKAT

PINDAI AKSES E-PPID KKP

<https://bit.ly/PPIDPPNPemangkat>



- 1. Permohonan Informasi Publik**
Pemohon Informasi menyampaikan permohonan informasi kepada PPID PPN Pemangkat
- 2. Registrasi Akun E-PPID**
Pemohon Informasi mengakses <https://ppid.kkp.go.id/> melakukan registrasi dengan menyiapkan persyaratan identitas diri, kelompok atau badan hukum
- 3. Mengisi Permohonan Informasi**
Pemohon Informasi mengakses layanan informasi dan pilih permohonan informasi kemudian mengisi dokumen pendukung, dan mengisi tujuan penggunaan informasi, serta kebutuhan dokumen informasi maksimal 5 tahun
- 4. Tanggapan Permohonan Informasi**
Pemohon Informasi menerima tanggapan permohonan informasi dari PPID paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi, dan dapat diperpanjang paling lambat 7 hari berikutnya.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK PPN PEMANGKAT

PINDAI AKSES E-PPID KKP

<https://bit.ly/PPIDPPNPemangkat>



- 1. Permohonan Menyampaikan Permohonan Keberatan Informasi Publik**
Pemohon Informasi menyampaikan permohonan keberatan Informasi Publik kepada PPID PPN Pemangkat
- 2. Mengajukan Keberatan Melalui E-PPID**
Menjelaskan cara mengajukan keberatan atas pelayanan informasi publik melalui <https://ppid.kkp.go.id/> dan mengisi form permohonan
- 3. Menganalisa Permohonan Keberatan**
Melakukan Penelusuran atas pengajuan keberatan dan merespon permohonan pengajuan keberatan, jika ditolak menyampaikan surat penjelasan penolakan, jika diterima menyampaikan informasi yang diminta pemohon.
- 4. Proses Pemberian Jawaban**
Permohonan pengajuan keberatan informasi menerima jawaban atas permohonan informasi publik
- 5. Selesai dan Pencatatan**
Petugas melakukan pencatatan pembukuan rekapitulasi permohonan informasi.

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Daftar Informasi Publik PPN Pemangkat Tahun 2024 :

<https://ppid.kkp.go.id/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara-pemangkat/layanan-informasi/daftar-informasi-publik/>

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Satker Yang Mengupload Informasi	Pemangku Jawab: pembuatan Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip	Action
1	Profil Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Profil Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Tahun 2024, Pemangkat	5 Tahun setelah menjadi arsip	
2	Daftar Informasi Dikecudikan KKP Tahun 2024	Daftar Informasi Dikecudikan KKP Tahun 2024	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Tahun 2024, Pemangkat	5 Tahun setelah menjadi arsip	
3	Standar Layanan Informasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan	Standar Layanan Informasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Tahun 2024, Pemangkat	5 Tahun setelah menjadi arsip	
4	Maklumat Pelayanan	Maklumat Pelayanan	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Tahun 2024, Pemangkat	5 Tahun setelah menjadi arsip	
5	Laporan Tahunan 2023	Laporan Tahunan 2023	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Tahun 2024, Pemangkat	5 Tahun setelah menjadi arsip	
6	Laporan Kinerja 2024	Laporan Kinerja 2024	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Tahun 2024, Pemangkat	5 Tahun setelah menjadi arsip	
7	Laporan Keuangan Tahun 2023	Laporan Keuangan Tahun 2023	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Tahun 2024, Pemangkat	5 Tahun setelah menjadi arsip	
8	Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024	Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Tahun 2024, Pemangkat	5 Tahun setelah menjadi arsip	
9	Profil Pejabat PPN Pemangkat	Profil Pejabat PPN Pemangkat	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Tahun 2024, Pemangkat	5 Tahun setelah menjadi arsip	

<https://ppid.kkp.go.id/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara-pemangkat/layanan-informasi/daftar-informasi-publik/>



Rekapitulasi Laporan Akses Informasi Publik PPN Pemangkat Tahun 2024

BAB VI

PENUTUP



6.1 PENUTUP

Dalam mewujudkan Pengelolaan Perikanan yang berkelanjutan, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang telah direncanakan. Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat telah menunjukkan capaian kinerja yang terukur dan beberapa penghargaan yang didapatkan.

Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Tahun 2024 menyajikan capaian program dan target pada Indikator Kinerja selama tahun 2024. Terhadap capaian Indikator Kinerja tersebut telah dilakukan analisis dan evaluasi untuk memastikan bahwa seluruh kinerja PPN Pemangkat telah sesuai dengan tugas dan fungsi unit/satuan kerja, memastikan pengukuran kinerja yang menghasilkan data kinerja yang objektif, valid dan reliable dan perubahan target kinerja sebagai dampak dari kondisi eksternal yang mengharuskan adanya perubahan.



PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT

JL. PENJAJAP TIMUR, PEMANGKAT
KABUPATEN SAMBAS
KALIMANTAN BARAT



<https://kkp.go.id/unit-kerja/djpt/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara-pemangkat.html>



ppn.pemangkat@kkp.go.id



(0562)244113